



**PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
TAHUN 2009–2013**

**Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2009**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2009 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 150 ayat (3) huruf b, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah, maka diperlukan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009.
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**dan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2009-2013.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

6. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II KEDUDUKAN RPJMD**

### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2009-2013, disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

## **BAB III DOKUMEN RPJMD**

### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPJMD Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Kondisi Umum
  - Bab III : Analisis Isu-isu Strategis
  - Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator
  - Bab VII : Penutup

## **BAB IV PENYUSUNAN RKPD TAHUN PERTAMA PERIODE GUBERNUR BERIKUTNYA**

### Pasal 4

Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, dengan mengacu kepada RPJMD ini.

### Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Mei 2009

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**TTD**

**HAMENGKU BUWONO X**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**TTD**

**Ir. TRI HARJUN ISMAJI, M.Sc  
NIP. 19510603 198103 1 003**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 4

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>1</b>
1. Maksud .....	1
2. Tujuan .....	1
<b>C. Landasan Hukum .....</b>	<b>2</b>
1. Landasan Idil .....	2
2. Landasan Konstitusional .....	2
3. Landasan Operasional .....	2
<b>D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....</b>	<b>3</b>
1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD .....	3
2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) .....	3
3. Hubungan RPJMD dengan RKPD .....	3
<b>E. Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan .....</b>	<b>4</b>
1. Kerangka Pikir .....	4
2. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II KONDISI UMUM .....</b>	<b>5</b>
<b>A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Geografi dan Lingkungan Hidup .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Perekonomian Daerah .....</b>	<b>7</b>
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	7
2. Investasi .....	9
3. Penerimaan Daerah .....	10
4. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .....	10
5. Pertanian .....	12
6. Ketahanan Pangan .....	13
7. Kehutanan dan Perkebunan .....	14
8. Perikanan dan Kelautan .....	14
9. Energi dan Sumberdaya Mineral .....	15
10. Pariwisata .....	15
<b>D. Sosial Budaya Daerah .....</b>	<b>17</b>
1. Kependudukan .....	17
2. Ketenagakerjaan .....	18
3. Transmigrasi .....	20
4. Kesejahteraan Sosial .....	20

5. Kesehatan .....	22
6. Pendidikan .....	24
7. Kebudayaan .....	25
8. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.....	25
9. Pemuda dan Olahraga .....	27
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	27
11. Penanggulangan Bencana .....	27
12. Keamanan dan Ketertiban .....	28
13. Agama .....	29
<b>E. Prasarana dan Sarana Daerah .....</b>	<b>29</b>
1. Transportasi .....	29
2. Sumberdaya Air .....	31
3. Air Minum/Air Bersih .....	32
4. Air Limbah/Sanitasi .....	33
5. Persampahan dan Drainase.....	33
6. Perumahan dan Permukiman .....	33
7. Komunikasi dan Informatika .....	34
<b>F. Struktur dan Pola Ruang .....</b>	<b>35</b>
<b>G. Pemerintahan, Hukum dan Politik .....</b>	<b>36</b>
1. Pemerintahan .....	36
2. Hukum .....	36
3. Politik .....	36
 <b>BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	 <b>38</b>
<b>A. Lingkungan Hidup .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Perekonomian Daerah .....</b>	<b>39</b>
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	39
2. Investasi .....	40
3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .....	40
4. Pertanian .....	42
5. Ketahanan Pangan .....	44
6. Kehutanan dan Perkebunan .....	45
7. Perikanan dan Kelautan .....	47
8. Energi dan Sumberdaya Mineral .....	48
9. Pariwisata .....	48
<b>C. Sosial Budaya Daerah .....</b>	<b>49</b>
1. Kependudukan .....	49
2. Ketenagakerjaan .....	49
3. Transmigrasi .....	49
4. Kesejahteraan Sosial .....	51
5. Kesehatan .....	51
6. Pendidikan .....	52
7. Kebudayaan .....	53
8. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.....	53
9. Pemuda dan Olahraga .....	54
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	55
11. Penanggulangan Bencana .....	55

<b>D. Prasarana dan Sarana Daerah .....</b>	<b>55</b>
1. Transportasi .....	55
2. Sumberdaya Air .....	56
3. Air Minum/Air Bersih .....	57
4. Air Limbah/Sanitasi .....	57
5. Persampahan dan Drainase.....	58
6. Perumahan dan Permukiman .....	58
7. Listrik .....	58
8. Komunikasi dan Informatika .....	59
<b>E. Struktur dan Pola Ruang .....</b>	<b>60</b>
1. Struktur Tata Ruang Provinsi DIY .....	60
2. Pola Ruang Provinsi DIY .....	60
<b>F. Pemerintahan, Hukum dan Politik .....</b>	<b>61</b>
1. Pemerintahan .....	61
2. Hukum .....	62
3. Politik .....	62
 <b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	 <b>63</b>
<b>A. Dasar Filosofi .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Visi .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Misi .....</b>	<b>64</b>
<b>D. Tujuan .....</b>	<b>64</b>
<b>E. Sasaran .....</b>	<b>64</b>
 <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	 <b>66</b>
<b>A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....</b>	<b>66</b>
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....	67
2. Optimalisasi Aset Daerah .....	67
3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil .....	68
<b>B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .....</b>	<b>68</b>
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran .....	68
2. Prioritas .....	68
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja .....	68
4. Optimalisasi Belanja Langsung .....	68
5. Transparan dan Akuntabel .....	69
<b>C. Kebijakan Umum Anggaran .....</b>	<b>69</b>
1. Pendapatan Daerah .....	69
2. Belanja Daerah .....	70
3. Pembiayaan Daerah .....	70
 <b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR .....</b>	 <b>72</b>
<b>A. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator</b>	
<b>Misi Pertama .....</b>	<b>72</b>
1. Strategi .....	72
2. Kebijakan .....	72
3. Program .....	73
4. Indikator .....	75

<b>B. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator</b>	
<b>Misi Kedua</b> .....	<b>78</b>
1. Strategi .....	78
2. Kebijakan .....	78
3. Program .....	79
4. Indikator .....	81
<b>C. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator</b>	
<b>Misi Ketiga</b> .....	<b>83</b>
1. Strategi .....	83
2. Kebijakan .....	83
3. Program .....	83
4. Indikator .....	84
<b>D. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator</b>	
<b>Misi Keempat</b> .....	<b>85</b>
1. Strategi .....	85
2. Kebijakan .....	85
3. Program .....	86
4. Indikator .....	87
<b>E. Matrik: Hubungan Tahapan dan Prioritas RPJPD 2005-2025 Tahap II     dengan Arah Kebijakan RPJMD 2009-2013</b> .....	<b>90</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>109</b>

**LAMPIRAN :  
PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : MEI 2009**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2009-2013 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DIY.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Bappeda.

2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM DIY.

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **2. Tujuan**

RPJMD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi DIY dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2009-2013, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

### 1. Landasan Idiil

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

### 2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

### 3. Landasan Operasional

- a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- m) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;
- r) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
- s) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- t) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
- u) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;
- v) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
- w) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

#### **D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

##### **1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD**

RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

##### **2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)**

Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

##### **3. Hubungan RPJMD dengan RKPD**

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD.



## **BAB II KONDISI UMUM**

### **A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

## B. Geografi dan Lingkungan Hidup

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7°3'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Wilayah administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

1. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan);
2. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa);
3. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa);
4. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km<sup>2</sup>, terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa);
5. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa).

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi sebagai berikut:

1. Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.
2. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang.
3. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural *denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.
4. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan *gumuk* pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan.

Dalam bidang lingkungan hidup, akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam menipis. Kawasan hutan dengan luas 23,54% dari luas wilayah DIY kurang mencukupi sebagai standar lingkungan hidup.

Di samping itu, pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO<sub>2</sub>, HC dan parikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor .

Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan. Kualitas air tanah dan air permukaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta penambahan usaha/kegiatan.

### C. Perekonomian Daerah

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY sejak tahun 2003–2008 terus mengalami perubahan yang relatif stabil, dengan kecenderungan menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian cenderung semakin menurun. Kontribusi sektor terhadap perekonomian DIY yang terdiri dari Sektor Pertanian, Sektor Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan Air Bersih, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-Jasa, masih memperlihatkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan sumbangan terbesar, yang diikuti oleh Sektor Pertanian, Sektor Jasa-Jasa, dan Sektor Industri Pengolahan. PDRB atas harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha dan penggunaan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel II.1**  
**PDRB Provinsi DIY Tahun 2004-2008 (milyar rupiah)**  
**(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 berdasarkan Lapangan Usaha)**

LAPANGAN USAHA		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	3.052,935	3.185,771	3.306,928	3.333,382	3.599,888
2	Penggalian	120,441	122,332	126,137	138,358	134,928
3	Industri Pengolahan	2.400,776	2.463,230	2.481,167	2.528,020	2.656,739
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	144,845	153,115	152,862	165,772	178,105
5	Konstruksi	1.284,471	1.395,079	1.580,312	1.732,945	1.673,111
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.279,424	3.444,828	3.569,622	3.750,365	3.914,271
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.582,194	1.673,352	1.761,672	1.875,307	1.994,241
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	1.500,542	1.623,210	1.591,885	1.695,163	1.832,327
9	Jasa-jasa	2.780,796	2.849,959	2.965,164	3.072,200	3.226,136
<b>PDRB DIY</b>		<b>16.146,424</b>	<b>16.910,877</b>	<b>17.535,749</b>	<b>18.291,512</b>	<b>19.209,746</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi DIY (2008), diolah

**Tabel II.2**  
**PDRB Provinsi DIY Tahun 2004-2008 (milyar rupiah)**  
**(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menurut Penggunaan)**

Jenis Penggunaan		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pengeluaran Konsumsi RT	7.746.270	7.849,106	7.959,534	8.132,032	8.538,304
2	Pengeluaran Konsumsi LSN	205.968	245,339	294,742	343,688	396,229
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.881.993	3.058,447	3.290,766	3.537,965	3.958,794
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.193.018	4.474,427	4.864,572	4.997,308	4.934,009
5	Perubahan Stok	966.883	999,054	1.276,071	1.445,731	1.599,275
6	Ekspor Barang dan Jasa	7.022.382	7.467,300	7.327,337	7.690,728	8.247,866
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6.870.092	7.182,796	7.477,274	7.855,940	8.464,731
<b>PDRB DIY</b>		<b>16.146.424</b>	<b>16.910,877</b>	<b>17.535,749</b>	<b>18.291,512</b>	<b>19.209,746</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi DIY (2008), diolah

Permasalahan yang dihadapi perekonomian DIY menyangkut dampak yang ditimbulkan dari krisis finansial yang melanda seluruh perekonomian di dunia, yaitu potensi penurunan pertumbuhan pada sektor jasa, perdagangan, pendidikan, hotel dan restoran. Selain itu, juga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel II.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2008**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	5,12	4,73	3,69	4,31	5,02

Sumber: BPS Provinsi DIY Tahun 2008

Tingkat inflasi di DIY pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir masih menunjukkan angka rata-rata lebih besar dari tingkat inflasi nasional. Tingkat inflasi nasional tahun 1999–2007 rata-rata sebesar 7,57% sedangkan untuk DIY sebesar 8,04%. Perkembangan inflasi DIY tahun 2008 menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah dari nasional, yaitu sebesar 9,88% (nasional 11,06%). Faktor resiko yang mendorong peningkatan inflasi adalah berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah dan ikutannya berupa meningkatnya harga komoditi impor, pengurangan bahan bakar minyak tanah bersubsidi serta faktor musiman.

**Tabel II.4**  
**Tingkat Inflasi di DIY Tahun 2004-2008**

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008
<b>INFLASI (%)</b>	6,95	14,98	10,4	7,99	9,88

Sumber : BPS, Provinsi DIY

Tujuan pembangunan di samping mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk, juga harus memperhatikan proses pemerataan atau distribusi nilai tambah yang terbentuk dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Proses distribusi perlu dicermati mengingat kegagalan proses ini akan berdampak pada gejolak sosial karena ketimpangan tersebut akan direspon sebagai ketidakadilan pada masyarakat golongan bawah. Untuk melihat ketimpangan/pemerataan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah koefisien Gini. Nilai koefisien ini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau sebaliknya. Menurut Oshima nilai koefisien Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai koefisien yang kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, nilai antara 0,30 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat dan lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Koefisien Gini penduduk DIY pada tahun 2003 – 2006 dibandingkan nasional menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dari tahun 2003-2006 koefisien Gini penduduk DIY memperlihatkan kecenderungan naik kemudian turun pada tahun 2006. Kondisi ini mengisyaratkan terjadinya penurunan pemerataan secara relatif dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan pemerataan relatif. Berdasarkan klasifikasi Oshima nilai Gini di DIY termasuk dalam kategori 'moderat' dan tidak terjadi perubahan ketimpangan yang signifikan.

**Tabel II.5**  
**Koefisien Gini Penduduk DIY**  
**Tahun 2003-2006**

	2003	2004	2005	2006
<b>DIY</b>	0,34	0,37	0,38	0,36
<b>NASIONAL</b>	0,32	0,32	0,36	0,33

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi DIY (2008), diolah

Untuk melihat tingkat pemerataan/ketimpangan antar kabupaten/kota dapat digunakan nilai Indeks Williamson (IW). Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1. Semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan antar kabupaten/kota semakin tidak merata. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan antar kabupaten/kota semakin merata.

Dari IW selama periode 2003 – 2007 diketahui, nilai IW di DIY semakin mendekati 1, pada tahun 2003 nilai IW sebesar 0,88 telah meningkat menjadi 0,93 pada tahun 2007 yang berarti distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di DIY semakin tidak merata. Meskipun perekonomian DIY senantiasa tumbuh dari tahun ke tahun, ternyata dari sisi distribusi pendapatan antar masyarakatnya di kabupaten/kota masih timpang.

**Tabel II.6**  
**Indeks williamson**  
**(Distribusi pendapatan antar kabupaten/kota) di DIY**  
**Tahun 2003-2007**

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>IW</b>	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93

*Sumber: BPS Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi DIY (2008), diolah*

Dengan melihat tingkat pemerataan/ketimpangan pendapatan penduduk ini maka kebijakan ke depan tetap diperlukan upaya menciptakan peluang atau akses yang berimbang bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan dari usaha-usaha ekonomi yang ada.

## 2. Investasi

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi DIY masih memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Dilihat dari kecenderungan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2003-2008 ada indikasi yang semakin meningkat. Pada lima tahun terakhir, PMA yang masuk ke DIY menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif tinggi. Untuk PMDN menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan kondisi yang kurang baik karena terjadi penurunan investasi. Hal ini terutama disebabkan kondisi infrastruktur yang memburuk sebagai akibat bencana gempa bumi tahun 2006.

Nilai realisasi investasi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.7**  
**Nilai Realisasi Investasi**

Tahun	PMDN (Rp juta)	Tumbuh (%)	PMA (Rp juta)	Tumbuh (%)
2003	2.405.275	22,61	1.330.333	35,64
2004	2.401.967	(0,14)	1.507.781	13,34
2005	2.251.067	(6,28)	1.945.218	29,01
2006	2.144.879	(4,72)	1.905.619	(2,04)
2007	1.801.534	(16,01)	2.299.446	20,67
2008	1.806.426	0,27	2.415.461	5,05

*Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka, 2004-2008*

*Ket.: Nilai PMA dikonversi dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku*

Beberapa permasalahan di bidang investasi adalah pelayanan birokrasi yang masih kurang memadai, baik di daerah maupun pusat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur masih perlu dioptimalkan. Informasi potensi investasi bagi investor merupakan suatu hal yang penting, sehingga dengan demikian para investor dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kelayakan investasi. Hal lain adalah koordinasi potensi investasi yang melibatkan antar-sektor dan antar-kabupaten/kota maupun pusat masih relatif kurang terpadu.

### 3. Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Komposisi PAD dalam penerimaan daerah di DIY, yang utama adalah berasal dari Pajak Daerah, yang kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Komposisi Dana Perimbangan dalam penerimaan daerah di DIY sebagian besar didominasi oleh DAU.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh di luar dari PAD dan Dana Perimbangan, yaitu berupa pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Dari sisi PAD, rata-rata capaian realisasinya dari yang ditargetkan menunjukkan sesuai yang diharapkan, yaitu melebihi dari yang ditargetkan dan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat serta persentasenya melebihi dana perimbangan. Selama kurun waktu 2004-2007 peningkatan PAD rata-rata sebesar 12,17%, sedangkan perbandingannya dengan Dana Perimbangan memperlihatkan angka 49,6% berbanding 42,6%.

Dari aspek penerimaan daerah, permasalahan yang dihadapi antara lain: PAD masih relatif kecil walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mendominasi perolehan PAD, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terutama dari bagian laba BUMD sangat rendah. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah untuk meningkatkan pendapatan.

### 4. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Perkembangan usaha pada industri kecil dan menengah di DIY dari tahun ke tahun memperlihatkan kondisi yang cenderung menurun dengan angka pertumbuhan yang selalu negatif dari tahun 2003-2006. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2005 sebesar 2,17% dan kembali menurun pada tahun 2006 dengan angka pertumbuhan negatif sebesar 3,99%. Hal ini bisa terjadi karena di DIY dari segi infrastruktur mengalami penurunan sebagai akibat dari gempa bumi. Penurunan jumlah unit usaha kecil menengah tersebut ternyata juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja di sektor ini yang tahun ke tahun mengindikasikan pertumbuhan yang cenderung menurun. Hal ini mendesak untuk diatasi mengingat berkurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Perkembangan sektor industri selama tahun 2008 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan jumlah unit usaha dari 75.140 buah pada tahun 2007 menjadi 76.267 unit usaha pada tahun 2008. Begitu juga penyerapan tenaga kerja meningkat dari sebanyak 264.368 orang pada tahun 2007 menjadi 273.621 orang pada tahun 2008. Nilai investasi juga meningkat dari Rp. 739,687 milyar pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.769,275 milyar pada tahun 2008.

Pada nilai produksi, hasil kinerja industri kecil menengah dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif fluktuatif angka pertumbuhannya. Perkembangan nilai ekspor cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel II.8**  
**Perkembangan Sektor Industri**  
**Tahun 2004-2008**

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
1	Unit usaha	78.609	74.826	74.291	75.140	76.267
2	Tenaga kerja (orang)	264.219	239.625	259.066	264.368	273.621
3	Nilai investasi (Rp milyar)	1.031,476	731,013	715,292	739,687	769,275
4	Nilai produksi (Rp milyar)	2.554,320	2.523,672	2.561,149	2.693,304	2.800,905
5	Nilai bahan (Rp milyar)	1.441,430	1.360,508	1.321,234	1.219,801	1.258,224

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

Dilihat dari jenis produk ekspor, varian produk dari tahun ke tahun masih tetap sama, bahwa potensi produk olahan kulit, tekstil dan kayu masih menjadi andalan. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun demikian secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni dan kreatif tinggi yang padat karya (*labor intensive*).

Nilai ekspor pada tahun mendatang masih dipengaruhi oleh krisis global saat ini melanda banyak negara pelanggan ekspor seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Kondisi ini merupakan permasalahan dari sisi *demand* untuk produk ekspor, karena terjadi penurunan daya beli negara pelanggan.

**Tabel II.9**  
**Perkembangan Sektor Perdagangan (Ekspor - Impor)**  
**Tahun 2004-2008**

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Ekspor:</b>						
1	Volume (juta kg)	42,30	47,28	41,49	36,65	40,58
2	Nilai (juta US\$)	122,27	143,47	138,47	125,56	130,25
3	Komoditi	81	86	97	101	103
4	Negara	92	96	93	99	97
5	Eksportir	243	249	248	235	256
<b>Impor:</b>						
1	Volume (juta kg)	20,77	8,28	7,44	8,39	8,86
2	Nilai (juta US\$)	18,37	36,28	59,80	42,62	50,71
3	Komoditi	11	9	14	15	25
4	Negara	19	21	23	21	24
5	Importir	14	12	13	12	17

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.

Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.866 UKM, mengalami kenaikan 215 UKM atau (2%) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.092 orang. Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha. Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan, yaitu sebanyak 4.705.

Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303,69% yaitu mencapai Rp. 105,828 milyar. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA. 2007.

Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.095, terdiri 1.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610.550 orang dan volume usaha sebesar rata-rata sebesar Rp. 1.086.048.

Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, sentra kulakan koperasi, warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agribisnis.

**Tabel II.10**  
**Perkembangan Koperasi dan UKM**  
**Tahun 2004-2008**

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Koperasi:</b>						
1	Aktif	1.644	1.507	1.379	1.414	1.469
2	Tidak Aktif	306	648	652	681	721
	<i>Total</i>	<i>1.950</i>	<i>2.155</i>	<i>2.031</i>	<i>2.095</i>	<i>2.190</i>
3	Modal Sendiri	253.410	180.877	223.101	267.051	319.516
4	Modal Luar	174.801	179.652	376.069	272.877	358.544
<b>UKM:</b>						
1	Aneka Usaha	2.214	2.375	2.441	2.499	2.557
2	Perdagangan	4.297	4.556	4.617	4.705	4.792
3	Industri Pertanian	1.503	1.503	1.632	1.659	1.691
4	Industri Non Pertanian	1.796	1.796	1.961	2.003	2.050
	<i>Total</i>	<i>9.810</i>	<i>10.230</i>	<i>10.651</i>	<i>10.866</i>	<i>11.090</i>

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

## 5. Pertanian

Tingkat kesejahteraan petani dalam bidang pertanian di Provinsi DIY yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. NTP menunjukkan kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berusaha tani dan konsumsi barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga. NTP dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah.

Khusus untuk tahun 2008, setelah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan, NTP akhir tahun tercatat sebagai berikut: pada posisi bulan Oktober NTP sebesar 110,23 dan pada posisi bulan November sebesar 105,71. Pada tahun 2007, NTP petani DIY sebesar 127,67. Sekilas teramati pengkerutan NTP dari tahun 2007 ke tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh perbedaan angka dasar yang digunakan dalam perhitungan NTP. Untuk tahun 2007, digunakan angka tahun 1993, sementara tahun 2008 digunakan sebagai angka dasar tahun 2008.

Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura cenderung meningkat, demikian pula populasi ternak besar, kecil dan unggas rata-rata mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, di sektor tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan masih menghadapi beberapa permasalahan. Alih fungsi lahan untuk kepentingan non pertanian merupakan ancaman utama untuk menjaga stabilitas produksi pangan. Pada tingkat petani, penyediaan dan pemeliharaan sarana irigasi untuk menjaga ketersediaan air pada lahan pertanian menjadi sangat penting. Di sektor peternakan, permasalahan yang dihadapi adalah penyediaan ternak untuk mencukupi konsumsi protein hewani yang relatif rendah.

## 6. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan ekonomi nasional, dengan demikian persoalan pangan seharusnya mendapat perhatian sama besar dengan upaya penegakan pilar-pilar lain dari hak azasi manusia. Kelaparan, kurang pangan, kurang gizi dan gizi buruk merupakan sisi lain dari kemiskinan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga;
- b. Distribusi pangan yang lancar dan merata;
- c. Konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM.

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan aparat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut diupayakan melalui:

- a. Pemanfaatan potensi dan keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan;
- b. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa produk pangan bergizi;
- c. Mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi sehingga menjamin pasokan pangan.

Angka kemiskinan di Provinsi DIY masih menunjukkan jumlah yang signifikan yakni 275.110 KK (275.110 KK) atau 25% dari jumlah penduduk DIY, sedangkan desa rawan pangan berdasarkan pemetaan SKPG tahun 2007 ada 198 Desa yang tersebar di 23 Kecamatan. Kondisi tersebut menyebabkan situasi yang kurang menguntungkan bagi ketahanan pangan.

Secara umum ketersediaan pangan di Provinsi DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah.

Sementara keragaman konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang optimal, hal ini ditunjukkan ketimpangan pada konsumsi terutama masalah:

- a. Konsumsi protein hewani yang masih rendah (ikan, ternak dan hasilnya);
- b. Pangan beragam dengan gizi berimbang masih jauh dari harapan.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) bahan pangan sehingga tidak terjadi ketergantungan pangan masyarakat pada pihak manapun. Dalam konteks inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani adalah produsen pangan sekaligus konsumen terbesar pangan, yang sebagian masih miskin dan memiliki daya beli yang lemah terhadap pangan; dengan demikian fokus yang diupayakan adalah membantu masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan yang handal dan berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan diukur dengan Neraca Bahan Makan (NBM) yaitu gambaran penyediaan pangan secara utuh dari komoditas tanaman pangan, ternak, ikan dan perkebunan mulai dari produksi, pengadaan dan penggunaannya sehingga tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi.

Ketersediaan daging dan telur pada tahun 2007 masing-masing 43.890.460 kg dan 346.073.432 butir, dan produksi susu 6.994.082 liter dibanding produksi daging tahun 2006 sebesar 34.272.622 kg mengalami kenaikan sebesar 28,06% dan telur 394.627.131 butir, mengalami penurunan 12,30% dan susu 11.061.486 liter juga mengalami penurunan sebesar 36,77% belum dapat memenuhi kebutuhan susu masyarakat di dalam provinsi.

Ketersediaan energi Provinsi DIY tahun 2007 sebesar 3.664 kkal/kapita/hari sedangkan standar nasional sebesar 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dari segi energi sudah terpenuhi. Apabila dilihat dari keanekaragaman pangan menunjukkan angka 88,1% dengan standar yang ditetapkan 100%. Tahun 2005 Standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari; ketersediaan protein 57 g/kap/hari; norma kecukupan gizi berdasarkan standar PPH >1.907,6/kkal/kap/hari, konsumsi energi minimum 1500 kkal/kap/hari, dan konsumsi protein sebesar 62,4 g/kap/hari, dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85,7%. Angka konsumsi energi di DIY sudah melampaui standar, yaitu sebesar 1.915,43 kkal/kap/hari sedangkan angka konsumsi protein masih belum memenuhi angka standar karena baru mencapai angka 55,30 g/kap/hari.

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya sumberdaya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan yang merupakan proses pembelajaran bagi pelaku usaha agar mampu dan mau menolong serta mengorganisasikan dirinya sehingga dapat mengakses sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu untuk mendukung program ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan yang tangguh mencakup kelembagaan, metodologi dan dukungan aparat penyuluh yang profesional dan berkarakter.

## **7. Kehutanan dan Perkebunan**

Pembangunan kehutanan tetap memprioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui penambahan luas hutan rakyat dan peningkatan kualitas hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Sesuai fungsi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung hutan berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat, ditinjau dari aspek sosial memberikan dukungan perilaku sosial masyarakat, ditinjau dari aspek ekonomi memberikan nilai tambah/pendapatan masyarakat dan dari aspek ekologis bermanfaat sebagai pengendali ekosistem wilayah. Hutan di Provinsi DIY didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Sektor perkebunan, dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di DIY adalah kelapa dan tebu. Pada Tahun 2007 produksi masing-masing komoditas mencapai 48.323,79 ton dan 13,423 ton. Kegiatan perkebunan diprioritaskan dalam rangka pengutuhan tanaman memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani.

Permasalahan pengembangan sektor Kehutanan dan Perkebunan antara lain: masih rendahnya daya dukung lahan, air dan hutan, masih rendahnya daya saing produk perkebunan, penyusutan lahan perkebunan karena alih fungsi lahan untuk keperluan non pertanian, perlunya peremajaan tanaman perkebunan yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitas tanaman, pemberantasan hama penyakit tanaman yang merusak tanaman dan mengurangi produktivitas tanaman.

## **8. Perikanan dan Kelautan**

Di sektor perikanan dan kelautan, produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan laju pertumbuhan positif. Produksi perikanan di DIY lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya air tawar. Pergeseran budaya dan pemenuhan kebutuhan akan protein hewani (ikan) di DIY dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan perkapita dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan di DIY mengalami peningkatan, tahun 2007 sebesar 15,49 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 17,03 kg/kapita/tahun atau mengalami peningkatan sebesar 9,94%. Namun demikian angka tersebut masih di bawah nasional yang mencapai 28,57 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan dimungkinkan karena keberhasilan kegiatan sosialisasi gemar ikan serta didukung oleh kenaikan produksi ikan sebesar 12,70%.

Pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk perikanan tangkap masih dapat dioptimalkan, salah satunya melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah, diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas tuna yang menjadi produk unggulan, baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri, sedangkan perikanan budidaya baik budidaya air tawar maupun air payau pemanfaatannya belum optimal dari potensi yang ada.

Produksi perikanan budidaya tahun 2008 baru mencapai 14.539,8 ton, sementara kebutuhan konsumsi ikan di DIY sudah mencapai 58.885,24 ton. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, perlu ditingkatkan dengan kebijakan menumbuhkan usaha-usaha baru melalui program peningkatan produk dengan pendekatan kewilayahan, pendekatan komoditas, dan pendekatan kelembagaan.

## 9. Energi dan Sumberdaya Mineral

Sumberdaya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara. Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo .

Keberadaan sumberdaya mineral ini, selain merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan, juga merupakan sumber ancaman bagi kerusakan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, upaya untuk tetap mengawasi kawasan penambangan menjadi mutlak dilakukan, seperti penertiban terhadap penambang tanpa ijin.

Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT. PLN dan PT. Pertamina. Gambaran kinerja sektor pertambangan dan energi, khususnya listrik, minyak dan gas di Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Rasio elektrifikasi sebesar 84,71% (perbandingan jumlah pelanggan dan jumlah rumah tangga), meningkat bila dibandingkan tahun 2006 (73,51%).
- b. Kebutuhan minyak dan gas: minyak tanah 116.730 kiloliter, premium 348.521 kiloliter, solar 91.496 kiloliter dan LPG 27.600 kiloliter.

Pada tahun 2008 pembangunan ketenagalistrikan dilakukan untuk menjangkau wilayah perdesaan termasuk wilayah non kompetisi yang pada umumnya merupakan desa tertinggal. Dari 4.512 dusun se DIY, sebanyak 4.412 dusun (sekitar 97,70 %) telah berlistrik.

Dalam bidang ketenagalistrikan, kebijakan pemerintah adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi yang relatif murah dan berkelanjutan (*sustainable*). Selain itu juga diupayakan terjadinya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana listrik untuk mendorong pemerataan pembangunan serta membuka isolasi masyarakat terpencil.

## 10. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi di DIY, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata DIY saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif. Komitmen dan konsistensi pembangunan pariwisata DIY yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penerapannya dititik beratkan pada strategi pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan pemasaran, pengembangan kemitraan, ketataruangan, aksesibilitas, SDM, kelembagaan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreatifitas seni dan keramahmataman masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.

Potensi pariwisata juga didukung oleh adanya Indonesia Mini, karena di DIY banyak ditemukan pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia maupun luar negeri, dengan berbagai kepentingan seperti pelajar, mahasiswa, dan usahawan. Kehadiran mereka dimungkinkan membentuk berbagai akulturasi budaya. Keberadaan mereka selain sebagai pasar yang potensial sekaligus juga merupakan alat promosi yang baik bagi pariwisata DIY.

Kekhasan aneka budaya ini apabila dikelola dengan baik, akan mejadi salah satu produk wisata. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran.

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY memperlihatkan kecenderungan positif. Pada tahun 2007 kunjungan wisatawan nusantara yang berkunjung ke DIY berjumlah 1.146.197 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 103.224 orang atau total jumlah wisatawan sebanyak 1.249.421 orang.

Hal ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2006 (914.827 orang) dan melampaui target kunjungan tahun 2007 sebanyak 1.100.000 orang. Sementara itu lama tinggal (*Length Of Stay-LOS*) wisatawan mancanegara mencapai 1,78 hari, sedangkan wisatawan nusantara selama 1,73 hari, dengan rata-rata LOS tahun 2007 selama 1,75 hari.

**Tabel II.11**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2004	103.401	8,13	1.688.599	21,43
2005	103.488	0,08	1.747.195	3,47
2006	78.145	(24,49)	836.682	(52,11)
2007	103.215	32,08	1.146.197	36,99
2008	128.660	24,65	1.156.097	1,60

Sumber: Baparda DIY Tahun 2007

Semakin kondusifnya kepariwisataan DIY maka pada tahun 2008 ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY mengalami peningkatan hingga mencapai 1.284.757 orang (Wisman: 128.660 orang dan Wisnus: 1.156.097 orang), lama tinggal (LOS) wisatawan menjadi 1,81 hari.

Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa; perdagangan, hotel dan restoran; serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi efek pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan.

Secara umum, sektor pariwisata masih menghadapi kendala berupa lemahnya manajemen pariwisata yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menguatkan citra DIY sebagai destinasi unggulan pariwisata; lemahnya jejaring dan kerjasama antar-pengelola produk, antar-wilayah dan pelaku usaha jasa pariwisata; kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang atraksi, keramah-tamahan dan aksesibilitas ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); dan belum optimalnya koordinasi kerjasama pelaku ekonomi sosial budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat serta pemerintah.

## D. Sosial Budaya Daerah

### 1. Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk DIY tahun 2003-2004 (SUSENAS 2004) tercatat pada tahun 2003 sebanyak 3.207.385 jiwa, dan pada tahun 2004 sebanyak 3.220.808 jiwa atau naik 0,42%. Sedangkan jumlah penduduk hasil proyeksi SUPAS 2005 menunjukkan pada tahun 2005 sebanyak 3.365.500 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 3.468.500 jiwa pada tahun 2008 atau naik rata-rata sebesar 1,01% pertahun. Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan rasio antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki rata-rata 99,51%.

Ditinjau dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat pada penduduk usia >65 tahun dan menurunnya jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun dari tahun 2003-2008, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.12**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa)**  
**Tahun 2003-2008**

Kelompok Usia	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0 – 14 tahun	693.844	696.992	641.400	640.100	637.100	637.100
15 – 64 tahun	2.210.066	2.217.128	2.413.700	2.445.400	2.478.800	2511300
> 65 tahun	303.475	306.688	310.400	314.600	318.600	320.100
<b>JUMLAH</b>	<b>3.207.385</b>	<b>3.220.808</b>	<b>3.365.500</b>	<b>3.400.100</b>	<b>3.434.500</b>	<b>3.468.500</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2004-2008, Badan Pusat Statistik DIY

Tahun 2003-2004 hasil SUSENAS-2004, Tahun 2005-2008 Angka Proyeksi dari hasil SUPAS 2005

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut dapat diketahui jumlah penduduk usia kerja (PUK) dan jumlah penduduk di luar usia kerja (PDUK). PUK adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan PDUK merupakan penduduk di luar usia 15-64 tahun atau usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Berdasarkan PUK dan PDUK diketahui bahwa tingkat beban/tanggungannya (*dependency ratio*) penduduk DIY selama tahun 2003-2008 menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu dari 0,45 pada tahun 2003 menjadi 0,38 pada tahun 2008. *Dependency ratio* merupakan perbandingan jumlah penduduk di luar usia kerja dengan jumlah penduduk usia kerja atau parameter yang memperlihatkan perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif. Penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja serta *dependency ratio* penduduk DIY seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.13**  
**Penduduk Usia Kerja (PUK), Penduduk Di Luar Usia Kerja (PDUK) dan Rasio**  
**Beban/Tanggungannya Penduduk DIY**  
**Tahun 2003-2008**

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PUK	2.210.066	2.217.128	2.413.700	2.445.400	2.478.800	2.511.300
PDUK	997.319	1.003.680	951.800	954.700	955.700	957.200
Penduduk	3.207.385	3.220.808	3.365.500	3.400.100	3.434.500	3.468.500
Rasio Beban Penduduk	0,45	0,45	0,39	0,39	0,39	0,38

Sumber: DIY Dalam Angka 2004-2008, Badan Pusat Statistik DIY, diolah

Tahun 2003-2004 hasil SUSENAS-2004, Tahun 2005-2008 Angka Proyeksi dari hasil SUPAS 2005

Dari segi pendidikan, jumlah penduduk menurut status pendidikan kepala keluarga menunjukkan pergeseran yang menuju ke arah yang lebih baik, dari tingkat pendidikan rendah menuju ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.14**  
**Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Kepala Keluarga (Orang)**  
**Tahun 2007-2008**

Status Pendidikan Kepala Keluarga	2007	2008
Tidak Tamat SD	208.011	206.478
Tamat SD – SLTP	385.489	389.955
Tamat SLTA ke atas	317.196	331.506

Sumber: BKKBN Provinsi DIY

Selama tahun 2007-2008 kepala rumah tangga yang tidak tamat SD menurun 1%, yang tamat SD-SLTP meningkat 1,15% dan yang tamat SLTA ke atas naik 4,51%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan kepala keluarga mengalami peningkatan.

Dari sisi kepadatan penduduk, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun maka dengan luas wilayah yang tetap sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk DIY konsekuensinya mengalami kenaikan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.15**  
**Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY**  
**Tahun 2003-2007**

Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk				
		2003	2004	2005	2006	2007
1. Kulon Progo	586,27	635,76	636,67	637,54	638,17	638,69
2. Bantul	506,85	1.645,74	1.681,97	1.718,86	1.744,28	1.769,74
3. Gunungkidul	1.485,36	455,97	457,42	458,85	460,12	461,31
4. Sleman	574,82	1.669,12	1.703,74	1.738,95	1.762,6	1.786,24
5. Yogyakarta	32,5	12.990,18	13.252,86	13.519,78	13.700,25	13.880,55
<b>DIY</b>	<b>3.185,8</b>	<b>1025,1</b>	<b>1.040,64</b>	<b>1.056,41</b>	<b>1.067,27</b>	<b>1.078,08</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk berdasarkan Pertumbuhan SP 2000 – SUPAS 2005, DIY Dalam Angka 2008, Badan Pusat Statistik DIY

Berdasarkan proyeksi penduduk pertumbuhan SP 2000-SUPAS 2005 tercatat kepadatan penduduk DIY sebesar 1.078,08 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi ada di Kota Yogyakarta sebesar 13.880,55 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas wilayah DIY. Kepadatan terendah ada di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah kabupaten terluas mencapai 46,63% dari luas wilayah DIY, dihuni oleh 461,31 jiwa per km<sup>2</sup>.

## 2. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di DIY sangat terkait dengan masalah pengangguran, sempitnya kesempatan kerja, dan relatif rendahnya produktivitas. Jumlah angkatan kerja DIY tahun 2003-2007 mengalami peningkatan, pada tahun 2003 sebanyak 1.756.662 orang meningkat menjadi 1.815.362 orang pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 3,23%. Besarnya jumlah angkatan kerja mengandung konsekuensi besarnya kebutuhan penciptaan lapangan kerja agar angka pengangguran dapat ditekan.

Pada tahun-tahun mendatang kecenderungan jumlah angkatan kerja akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah angkatan kerja yang bekerja memberikan iklim yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan, jika disertai dengan ketersediaan lapangan kerja secara memadai. Jumlah angkatan kerja di DIY menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2003 sejumlah 1.756.662 orang; tahun 2004 sejumlah 1.815.362 orang; tahun 2005 sejumlah 1.851.209 orang; tahun 2006 sejumlah 1.871.974 orang; dan tahun 2007 sejumlah 1.954.419 orang.

Pada tahun 2008 jumlah pencari kerja berdasarkan "Kartu Kuning" sebanyak 84.962 orang atau turun 2,79 % dibandingkan tahun 2007, sebanyak 87.324 orang. Melalui program peningkatan kesempatan kerja tercapai perluasan kesempatan kerja sebanyak 6.075 orang dan penempatan tenaga kerja sebanyak 5.536 orang.

Berdasarkan data tahun 2003 – 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi DIY yang merupakan persentase antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja menunjukkan angka yang fluktuatif atau rata-rata setiap tahun sebesar 78,75%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (*open unemployment*) atau TPT yang merupakan persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang ingin/sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja juga menunjukkan angka yang fluktuatif atau rata-rata setiap tahun sebesar 5,90%.

**Tabel II.16**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Provinsi DIY**  
**Tahun 2003-2008**

U R A I A N	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Angkatan Kerja</b>	1.756.662	1.815.362	1.851.209	1.871.974	1.954.419	1.985.563
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	453.404	401.766	562.491	573.426	524.381	525.737
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	2.210.066	2.217.128	2.413.700	2.445.400	2.478.800	2.511.300
<b>TPAK (%)</b>	79,48	81,88	76,70	76,55	78,85	79,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, diolah

**Tabel II.17**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka PROVINSI DIY**  
**Tahun 2003-2008**

U R A I A N	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Bekerja</b>	1.658.103	1.701.802	1.757.702	1.754.950	1.835.542	1.864.028
<b>Menganggur</b>	98.559	113.560	93.507	117.024	118.877	121.535
<b>Angkatan Kerja</b>	1.756.662	1.815.362	1.851.209	1.871.974	1.954.419	1.985.563
<b>TPT (%)</b>	5,61	6,26	5,05	6,25	6,08	6,12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, diolah

Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa untuk sektor pertanian dan sektor jasa relatif memberikan kontribusi paling banyak dalam menyerap tenaga kerja. Demikian juga peranan sektor pertanian cukup dominan dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan dapat dikembangkan sebagai penunjang ketersediaan tenaga kerja.

Hubungan tingkat pendidikan dengan lapangan pekerjaan menunjukkan prototipe pendidikan tamat SD/SLTA banyak bekerja di sektor pertanian, tamat SLTA banyak bekerja di sektor pertambangan dan penggalian, industri dan bangunan, sedangkan tamat akademi/universitas banyak bekerja di sektor jasa, keuangan, perdagangan, transportasi, listrik, gas dan air minum.

Fenomena pengangguran menjadi problematika kependudukan yang cukup serius karena berdampak multidimensional. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi. Merebaknya pengangguran intelektual menggugah kegelisahan masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Penyebab utama pengangguran adalah jumlah kesempatan kerja yang tidak sebanding jumlah angkatan kerja dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Secara makro, laju pertumbuhan kesempatan kerja terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja.

### **3. Transmigrasi**

Pelaksanaan pemberangkatan transmigran asal DIY sampai pada tahun 2008 melalui program transmigrasi sejumlah 76.495 KK atau 274.926 Jiwa. Ditinjau dari pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, melalui Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Untuk persebarannya sudah mencakup hampir seluruh Provinsi.

Terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, mengakibatkan bergesernya paradigma pelaksanaan transmigrasi yang merupakan kerjasama antar pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima), sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai fasilitator.

Sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sumberdaya manusia dan memiliki daerah yang kurang subur serta rawan bencana, maka hal ini menjadi pendorong bagi sebagian penduduk untuk melakukan migrasi. Mengacu pada pemikiran di atas, maka DIY merupakan salah satu basis kawasan yang mampu untuk menjadi kantong pengerahan transmigran.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan transmigrasi di DIY khususnya dalam mendorong pembangunan transmigrasi daerah asal, maka perlu dilakukan pemetaan fungsi kantong calon transmigran di wilayah DIY.

Pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi sasaran pengerahan transmigrasi untuk skala detail dalam pelaksanaan ke depan akan punya arti yang sangat penting dalam upaya penanganan program serta penyusunan pengerahan jangka pendek atau tahunan.

Penyusunan identifikasi potensi pengerahan skala detail merupakan bentuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tipologi daerah pengerahan, profil indikasi calon transmigran dan arah minat bertransmigrasi yang diindikasikan dengan motivasi dalam upaya mencapai tujuan tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih baik.

### **4. Kesejahteraan Sosial**

Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005 (PSE 2005) menunjukkan di DIY persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 41.33% di wilayah perkotaan dan 58.67% di wilayah perdesaan. Selama Juli 2005-Maret 2007, garis kemiskinan naik sebesar 19,77%, yaitu dari Rp.148.476,- per kapita per bulan pada Juli 2005 menjadi Rp.184.965,- per kapita per bulan pada Maret 2007. Tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 275.110 RTM dan menerima bantuan raskin dari pemerintah pusat (meningkat 27 persen dibanding periode tahun 2006 sebanyak 216.536 RTM).

Penduduk DIY menurut tahapan kesejahteraan tercatat bahwa tahun 2007 kelompok pra sejahtera 21,12%; Sejahtera I 22,70%; Sejahtera II 23,69%; Sejahtera III 26,83%; dan Sejahtera III plus 5,66% (BPS, DIY dalam Angka 2008). Jumlah penduduk miskin sesuai data BPS tahun 2008 berdasarkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima Raskin sebanyak 201.772 RTS dan terdapat sebanyak 13.404 RTS sedang dalam klarifikasi dan validasi, maksimum angka RTS adalah sebanyak 215.032 RTS.

Masalah kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar dan pemecahan permasalahannya menjadi agenda utama pembangunan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Standar kebutuhan hidup minimum satu daerah dengan daerah lain berbeda, karena sangat tergantung kepada kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografis. Kebutuhan minimum tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Patokan tingkat kecukupan kalori yang dijadikan acuan adalah sebesar 2.100 kilo kalori setiap orang per hari untuk kebutuhan makanan. Selain kebutuhan makanan juga diperlukan kebutuhan lain yang minimum harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi tempat perlindungan (rumah) termasuk fasilitas penerangan, bahan bakar dan pemeliharaan, pakaian termasuk alas kaki, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan perawatan pribadi, dan transportasi. Nilai pengeluaran makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan nilai pengeluaran untuk non makanan bila dijumlahkan merupakan batas minimum yang dibutuhkan untuk hidup tidak miskin.

Perkembangan kondisi kemiskinan di suatu daerah secara ekonomis merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dengan semakin membaiknya kondisi kemiskinan yang ada maka dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kondisi kemiskinan di DIY dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini. Dari tahun 2003-2008 penduduk miskin di DIY jumlahnya fluktuatif.

**Tabel II.18**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi DIY**  
**Tahun 2003-2008**

U R A I A N	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	636.800	616.200	625.800	648.700	633.500	616.300
<b>Jumlah Penduduk</b>	3.207.385	3.220.808	3.365.500	3.400.100	3.434.500	3.468.500
<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	19,85	19,13	18,59	19,08	18,45	17,77

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mempunyai penduduk miskin terbesar, kemudian diikuti Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Banyaknya penduduk miskin yang tinggal di Gunungkidul, terkait erat dengan kondisi geografisnya yang merupakan daerah pertanian, umumnya merupakan lahan kering, dengan produktivitas lahan yang relatif rendah karena tanahnya tandus dan ketersediaan air sangat terbatas. Akibatnya pendapatan sebagian masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikelompokkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan), tingkat intelektual yang rendah (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi), sikap mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental), sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan), kurang ketrampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja) dan kurang modal (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja). Faktor eksternal meliputi terbatasnya pelayanan sosial dasar, terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan selama ini telah dilakukan program/kegiatan pengentasan penduduk miskin di DIY yang terdiri dari program langsung dan tidak langsung. Program langsung mempunyai sasaran langsung kepada masyarakat atau kelompok dengan jangka waktu yang relatif pendek. Program ini terdiri atas sinergisme program *rescue and recovery*, sedangkan program tidak langsung lebih bersifat makro dengan tekanan pada *multiplier effect*. Dari program tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain program tak langsung lebih diarahkan kepada pelaksanaan program-program yang bersifat *development*. Program-program pengentasan penduduk miskin yang dilaksanakan di DIY antara lain meliputi: Bantuan langsung pada sasaran dan kantong-kantong kemiskinan, Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (KPPE), Pengembangan P-3 (Pertanian, Peternakan, Perikanan) Lahan Pantai Selatan.

Dari sisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang paling menonjol adalah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, serta yatim-piatu. Meningkatnya PMKS terutama akibat dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar ditambah masalah sosial yang muncul akibat bencana alam.

Pada tahun 2008 jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 24.036 orang dan anak terlantar berjumlah 36.468 orang (Pemutakhiran Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2008). Jumlah penyandang cacat dengan kategori cacat berat dan ringan sebanyak 41.219 orang (pendataan tahun 2008) terdiri cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara dan cacat mental serta bekas penderita penyakit kronis. Jumlah penyandang cacat cenderung bertambah akibat kecelakaan baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Akibat gempa bumi tektonik 27 Mei 2006 penyandang cacat bertambah 938 orang.

Jumlah korban tindak kekerasan tahun 2008 berjumlah 8.808 orang, sebagian besar adalah kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan suami kepada istri dan kekerasan dalam pekerjaan.

## 5. Kesehatan

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan.

Arah pembangunan kesehatan di DIY secara umum adalah untuk mewujudkan Provinsi DIY yang memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran internasional khususnya Asia Tenggara dengan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikan DIY sebagai pusat mutu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan kesehatan serta konsultasi kesehatan.

Sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan, pembangunan kesehatan menjadi salah satu instrumen di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pembangunan kesehatan Provinsi DIY menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

### a. Mortalitas

Umur Harapan Hidup (UHH) lahir penduduk DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia. UHH penduduk menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 73 tahun pada tahun 2006 menjadi 74,05 tahun pada tahun 2008. Penyakit jantung dan stroke selama 10 tahun terakhir telah menjadi pembunuh tertinggi penduduk disusul oleh cedera kepala akibat kecelakaan.

Angka kematian bayi menunjukkan penurunan dari sebesar 20/1000 kelahiran pada tahun 2003, menjadi 17/1000 kelahiran pada tahun 2007 dan turun lagi menjadi 11/1.000 kelahiran pada tahun 2008. Angka kematian balita pada tahun 2003 sebesar 23/1000 balita, turun menjadi 19/1000 balita pada tahun 2007 dan turun lagi menjadi 14/1.000 balita pada tahun 2008. Angka kematian ibu pada tahun 2005 sebesar 110/100.000 kelahiran hidup, turun menjadi 105/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan turun lagi menjadi 93/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008.

b. Morbiditas

Angka kesakitan DBD masih cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Incident Rate (IR). Pada tahun 2007 mencapai 74,05/100.000 penduduk, turun menjadi 62,3/100.000 penduduk pada tahun. Tingkat kematian penderita DBD tahun 2008 sebesar 0,96 %, menurun dibandingkan tahun 2007 dengan angka 1,06 %, meski masih tetap lebih tinggi dibandingkan nasional.

Tahun 2007 angka kesembuhan pengobatan TBC baru mencapai 79,10% (target 85%) dengan angka penemuan penderita sebesar 51,54% (target 70%). Penyakit malaria telah menurun signifikan namun masih ditemukan episentrum KLB malaria dan penularan setempat (*indigenous*) sebanyak 53 kasus. Persentase HIV hasil sentinel survey di DIY mengalami peningkatan dan menempatkan DIY pada urutan ke 17 secara nasional. Di DIY telah terdeteksi unggas positif Avian Influenza sehingga potensi penularan penyakit ini masih ada.

c. Status gizi

Prosentase keberadaan gizi buruk di Provinsi DIY pada tahun 2008 pada angka 0,88%, meskipun angka ini lebih baik dari angka 0,94 % pada tahun 2007. Namun begitu, kecamatan bebas rawan gizi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

d. Perilaku hidup masyarakat

Tahun 2006 jumlah rumah tangga yang telah dibina agar berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebanyak 224.890 rumah tangga, namun jumlah rumah tangga yang telah melaksanakannya hanya sebesar 184.554 KK (82,06%).

Berdasarkan data Susenas tahun 2005 dan 2006, akses masyarakat terhadap air bersih mengalami peningkatan, begitu pun persentase keluarga menggunakan jamban sehat.

Penyakit jantung dan stroke telah menjadi pembunuh nomor satu di DIY sementara faktor risiko penyakit jantung penduduk DIY ternyata cukup tinggi.

Rumah tangga di DIY yang tidak bebas asap rokok sebesar 56%, sedangkan remaja yang perokok aktif sebesar 9,3%.

Sebanyak 52% penduduk DIY kurang melakukan aktifitas olahraga dan hanya 19,8% penduduk DIY yang mengkonsumsi serat mencukupi. Dalam tiga tahun terakhir angka obesitas pada anak-anak di DIY meningkat hampir 7%. Kegemukan usia dini memberikan risiko penyakit seperti jantung dan pembuluh darah.

e. Pelayanan kesehatan

Dari 118 Puskesmas, 20% puskesmas telah menerapkan sistem manajemen mutu melalui pendekatan ISO 9001:200; 7% rumah sakit telah menerapkan ISO 9001:200; 25% rumah sakit di DIY telah terakreditasi dengan 5 standar; 17% RS terakreditasi dengan 12 standar; dan 5% RS telah terakreditasi dengan 16 standar pelayanan. Sarana pelayanan kesehatan yang memiliki unit pelayanan gawat darurat meningkat menjadi 40% dan RS dengan pelayanan kesehatan jiwa meningkat menjadi 9%. Meskipun demikian cakupan rawat jalan tahun 2006 baru mencapai 10% (nasional 15%) sementara untuk rawat inap 1,2% (nasional 1,5%). Rasio pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

Proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga medis pada tahun 2006 sebesar 87,79% (target SPM 77%). Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) telah mencapai 84,01%. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil sebagai perlindungan dari risiko anemia telah mencapai 80,74% pada tahun 2007. Sejak tahun 2003 telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos). Jumlah peserta pada tahun 2005 sebanyak 95.000 dan pada tahun 2008 ditingkatkan menjadi 332.139 orang.

f. Sumberdaya kesehatan

Sumberdaya kesehatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta efektifitas penggunaan. Sumberdaya kesehatan meliputi tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker bidan dan perawat, ahli gizi, ahli sanitasi kesehatan masyarakat. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk menunjukkan tren meningkat sebesar 39,64 pada tahun 2006.

g. Keluarga Berencana

Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan sarana pelayanan dan prasarana yang memadai. Hal ini memperoleh respon baik dari masyarakat yang tercermin dengan tingginya pencapaian akseptor aktif. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, tercermin pada pencapaian peserta KB baru. Pada tahun 2007 jumlah tempat pelayanan KB juga semakin bertambah kecuali klinik KB swasta yang semakin menurun, namun hal ini tidak berpengaruh pada pelayanan KB. Hasil Pelayanan KB Baru pada tahun 2007 menurun sebesar 52,87 persen dibandingkan tahun 2006.

## 6. Pendidikan

Indikator mutu pendidikan dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi, yang terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI Provinsi DIY pada tahun 2008 menunjukkan angka sebesar 109,86%, SMP/MTs sebesar 117,15%, SMA/MA/SMK sebesar 79,02%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI adalah sebesar 95,17%, SMP/MTs sebesar 77,41% dan SMA/MA/SMK sebesar 57,22%. Dibanding dengan tahun sebelumnya angka-angka tersebut mengalami kenaikan walaupun relatif kecil.

Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai Sekolah Menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa. Jumlah sekolah negeri maupun swasta yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2008 adalah: SD/MI sejumlah 2.035, SMP/MTs/SMP Terbuka sejumlah 529, dan SMA/MA/SMK sejumlah 381. Ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah memadai dengan rasio siswa per kelas untuk SD/MI: 23, SMP/MTs: 35, SMA/MA/SMK: 31. Sedangkan tingkat ketersediaan guru di Provinsi DIY juga cukup memadai dengan rasio siswa per guru untuk SD/MI: 13, SMP/MTs: 11, SMA/MA/SMK: 9.

Para lulusan SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTs, sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah. Angka kelulusan SD mencapai 98,85%, SMP mencapai 99,92% dan SMA/MA/SMK sebesar 98,17%.

Jumlah perguruan tinggi di Provinsi DIY baik negeri, swasta maupun kedinasan seluruhnya sebanyak 136 institusi dengan rincian 21 universitas, 5 institut, 41 sekolah tinggi, 8 politeknik dan 61 akademi yang diasuh oleh 9.736 dosen.

Dunia pendidikan di Provinsi DIY harus segera berbenah di tengah berkembangnya dan upaya revitalisasi berbagai kota dan provinsi lain di bidang pendidikan. Pijakan utamanya bukan semata-mata perkembangan dunia pendidikan di kota/provinsi lain, namun pada kebutuhan masyarakat.

Pembenahan yang dilakukan harus menyentuh pada substansi masalah pendidikan, diantaranya: pendidikan yang bisa diakses seluruh warganya pada setiap jalur/jenjang/jenis pendidikan dengan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya perlu peningkatan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendorong berkembangnya dunia pendidikan, terlebih sarana perpustakaan serta sarana-prasarana ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendorong penguasaan informasi untuk tercapainya berbagai efisiensi. Selain itu juga pengembangan jejaring yang mampu mendorong perkembangan dunia pendidikan di DIY (ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran) dalam berbagai arah (inter-antar pelaku, regional-nasional-internasional).

## 7. Kebudayaan

Kebudayaan DIY berakar pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kedudukan Kraton yang mempunyai komitmen yang kuat dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan keunggulan kompetitif sumberdaya budaya.

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang *tangible* (fisik) maupun yang *intangible* (non fisik). Potensi budaya yang *tangible* antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya yang *intangible* seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat.

DIY memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi. Selain itu, Provinsi DIY juga mempunyai 30 museum, yang dua diantaranya yaitu museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional.

Kesenian di DIY juga cukup berkembang, baik yang ada di dalam Keraton maupun yang tersebar di masyarakat luas. Saat ini terdapat 5748 kelompok seni pertunjukan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Di Kota Yogyakarta terdapat 271 kelompok dengan 45 jenis kesenian, di Kabupaten Sleman terdapat 1242 kelompok dengan 52 jenis kesenian, di Bantul terdapat 1193 kelompok dengan 52 jenis kesenian, dan di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1206 kelompok dengan 46 jenis kesenian, serta di Kabupaten Gunungkidul terdapat 1514 kelompok dengan 51 jenis kesenian. Dari jumlah kelompok seni pertunjukan tersebut, kondisinya sangat beragam karena belum semua kelompok dikelola secara profesional.

Pengembangan budaya juga dilakukan dengan pembentukan desa budaya. Saat ini terdapat 32 desa budaya yang terdiri dari 6 desa budaya di Kabupaten Bantul, 10 desa budaya di Kabupaten Kulon Progo, 10 desa budaya di Kabupaten Gunungkidul dan 6 desa budaya di Kabupaten Sleman. Di samping itu, masih ada 9 desa lagi yang diusulkan kabupaten menjadi desa budaya di Provinsi DIY.

Pengembangan kebudayaan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, penyelenggaraan aktifitas seni budaya, pemberian penghargaan seni, dan pemeliharaan kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya. Dari pengembangan tersebut, bidang kebudayaan telah mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2007 terdapat upaya pelestarian terhadap 15 jenis upacara adat masyarakat, rehabilitasi dan konservasi 13 kawasan cagar budaya dan 93 benda cagar budaya serta ikut serta dalam ajang seni dan budaya dalam berbagai *event*, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Potensi budaya yang *intangible* yang merupakan gagasan, ide, norma maupun sistem sosial dan pola perilaku masyarakat, berorientasi kepada nilai-nilai budaya Jawa yang dikelola bersinergi dengan masyarakat pelaku budaya, lembaga dan institusi budaya. Upaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dan budaya lokal terus dilakukan agar tidak tergerus oleh arus kapitalisasi dan globalisasi.

Upaya untuk mempertahankan budaya non fisik tidak terlepas dari pendidikan yang juga menanamkan nilai-nilai dan kearifan lokal termasuk pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai dan kearifan lokal seperti adat-istiadat, etika, serta filsafat hidup masyarakat Jawa agar tidak semakin tipis. Kehidupan masyarakat di DIY sebagai pusat pendidikan juga belum tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama budaya tertib berlalu lintas dan budaya antri dalam memperoleh pelayanan publik. Memudarnya budaya di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan ketahanan budaya semakin rentan terhadap perubahan globalisasi dan terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal.

## 8. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

Upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan telah dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu berperan secara proporsional sejajar dengan kaum pria dalam pembangunan di segala bidang sesuai dengan harkat dan martabat perempuan Indonesia.

Capaian kesetaraan gender dalam pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tahun 1999 GDI DIY mencapai 66,40%; tahun 2002 turun menjadi 65,20%; dan meningkat kembali pada tahun 2005 mencapai 70,2% menempati peringkat pertama nasional; selanjutnya pada tahun 2006 naik menjadi 70,3% menempati peringkat 2 setelah DKI Jakarta.

Mendasar pada hasil sensus penduduk, rasio jenis kelamin (perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan) di DIY menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 94,3 di tahun 1971, menjadi 96,2 di tahun 1980, meningkat lagi menjadi 96,7 di tahun 1990, dan sebesar 98,3 di tahun 2000. Lebih lanjut berikut tergambar persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di DIY, berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 2005.

**Tabel II.19**  
**Jumlah Penduduk**  
**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DIY**  
**Tahun 2005-2008**

Kelompok Umur (tahun)	2005		2006		2007		2008	
	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>00-09</b>	12,15	10,97	12,20	10,10	12,25	10,27	12,30	10,45
<b>10-19</b>	14,17	13,58	14,07	13,61	14,07	13,08	14,01	13,33
<b>20-29</b>	20,61	19,05	20,48	18,91	20,41	18,71	20,17	18,48
<b>30-39</b>	14,39	14,01	14,43	14,51	14,48	14,90	14,18	14,42
<b>40-49</b>	11,80	11,90	11,80	11,40	11,60	11,02	11,78	11,40
<b>50-59</b>	6,26	7,20	6,25	7,42	6,00	7,00	6,37	7,70
<b>60 +</b>	20,14	23,25	20,76	23,25	20,19	24,02	20,49	24,22
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SUPAS 2005, DIY Dalam Angka 2008, diolah

Uraian di atas menunjukkan bahwa kelompok penduduk perempuan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 pada usia 00-19 tahun, sebesar 24,55% pada tahun 2005, 23,78% pada tahun 2008, sedangkan usia produktif 20-59 tahun sebesar 52,20% pada tahun 2005, dan pada tahun 2008 sebesar 52,00%, selebihnya usia tua di atas 60 tahun sebesar 23,25% pada tahun 2005, dan 24,22% pada tahun 2008. Adapun selisih penduduk antara perempuan dan laki-laki hanya 0,05% baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2008.

Upaya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan remaja dari berbagai tindak kekerasan dengan melibatkan peranserta masyarakat telah dilakukan untuk menjamin hak-hak secara layak dan baik. Namun demikian, angka kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja masih cukup tinggi baik dalam ranah domestik maupun publik. Jumlah anak terlantar tahun 2005 sebanyak 14.947 jiwa, tahun 2006 sebanyak 9.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 33.565 jiwa. Adapun balita terlantar pada tahun 2005 sebanyak 1.595 jiwa, tahun 2006 sebanyak 1.061 jiwa, dan tahun 2008 sebanyak 5.710 jiwa.

Permasalahan yang mengemuka dalam bidang pemberdayaan perempuan, anak dan remaja adalah belum tercapainya kesetaraan gender secara optimal di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja perlu terus ditingkatkan.

## 9. Pemuda dan Olahraga

Pembinaan pemuda selama ini sudah berjalan cukup baik. Banyak prestasi membanggakan diraih oleh pemuda baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kota pelajar dan kota pendidikan, DIY memiliki potensi pemuda yang unggul. Namun yang masih perlu ditingkatkan adalah kemandirian sosial pemuda untuk bisa *survive* dalam arus globalisasi yang bisa berdampak negatif pada pola relasi sosial, menipisnya semangat kebangsaan, dan gaya hidup hedonis. Semakin sempitnya lapangan kerja di sektor formal membutuhkan kemandirian pemuda untuk berwirausaha.

Prestasi olahraga dalam berbagai *event* sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang pemuda dan olahraga adalah kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan masih kurang, rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga masih kurang.

## 10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berbagai penelitian dan pengembangan IPTEK terus dilakukan, publikasi ilmiah terus berkembang. Hal ini mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam dunia pendidikan dan industri mengalami perkembangan pesat. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi cukup tinggi ditandai dengan relatif tingginya indikator angka melek TI (*IT literate rate*) sebesar 20% (tertinggi nomor 2 di Indonesia). Pengembangan TI, terutama perangkat lunak (*software*) banyak dilakukan oleh pihak swasta dan perguruan tinggi yang ditandai dengan makin berkembangnya pengelola jasa pengembangan TI.

Upaya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi oleh pihak industri dan masyarakat sudah dilakukan, namun demikian dapat dikatakan masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena belum efektifnya intermediasi, masih lemahnya sinergi kebijakan antara pengembang dan pemakai iptek, belum berkembangnya budaya iptek, dan masih terbatasnya sumberdaya iptek.

Permasalahan yang muncul adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi oleh pihak industri dan masyarakat masih rendah yang disebabkan karena belum efektifnya intermediasi; masih lemahnya sinergi kebijakan antara pengembang dan pemakai iptek, belum berkembangnya budaya iptek, serta masih terbatasnya sumberdaya iptek. Dalam bidang teknologi informasi permasalahan yang ada terutama adalah banyaknya kegiatan pembajakan perangkat lunak dan kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*).

## 11. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, bencana dapat di bedakan dalam tiga kelompok, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia atau sosial meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Secara geologis DIY merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam. Potensi bencana alam yang berkaitan dengan bahaya geologi yang meliputi:

- a. Bahaya alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- b. Bahaya gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Bahaya banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- d. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam *karst*.
- e. Bahaya tsunami, berpotensi terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30m dari permukaan air laut.
- f. Bahaya alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- g. Bahaya gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.

Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawannya relatif kecil.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penanggulangan bencana memegang peranan yang penting dalam rangka mengurangi resiko kerugian, baik pada saat prabencana, tanggap darurat; dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Terkait dengan potensi bencana alam, penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat penting, baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Dalam konteks penanggulangan bencana, permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya dayaguna rencana tata ruang wilayah dalam mengurangi resiko bencana. Selain itu, belum ada alat untuk mendeteksi gejala alam secara akurat untuk memberikan penanganan dini kepada masyarakat, serta masih kurangnya penggunaan peralatan berteknologi modern.

## 12. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari sisi kriminalitas dan kerawanan sosial. Kasus pencurian, terutama kendaraan bermotor dan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kedua kasus tersebut jumlahnya cukup besar, bahkan untuk kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kecenderungan meningkat.

Banyak hal yang memicu peningkatan tindak kriminalitas di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya motif dan modus kejahatan, hingga menurunnya sistem kontrol sosial di masyarakat. Bahkan untuk kasus *cyber crime*, telah memberikan sumbangan negatif bagi citra DIY sebagai wilayah yang nyaman bagi *cyber crime*. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, kecenderungan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa datang akan semakin meningkat.

### 13. Agama

Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng.

Aktivitas keagamaan juga berkembang dengan baik, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kampus. Berkembangnya aktivitas keagamaan ini dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren dan sekolah keagamaan. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai dan 2.694 ustadz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtdaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah. Aktivitas keagamaan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2007 terdapat 3.064 jamaah haji.

Hubungan antar pemeluk agama dan pemuka agama juga cukup baik yang ditandai tidak adanya konflik antar umat beragama di DIY. Perkembangan aktivitas keagamaan yang terjadi masih bersifat formalitas belum disertai dengan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianut sehingga belum sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan.

Pesan-pesan moral keagamaan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya fenomena yang menyimpang dari ajaran agama antara lain masalah narkoba dan seks bebas.

## E. Prasarana dan Sarana Daerah

### 1. Transportasi

Transportasi merupakan urat nadi dalam pembangunan. Transportasi mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Penataan Transportasi sangat berkaitan dengan sektor lain baik yang berhubungan dengan kondisi sosial manusia, kesadaran hukum, budaya berperilaku maupun lingkungan.

Kondisi transportasi darat saat ini dapat dikatakan masih memprihatinkan. Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dan dapat mengurangi beban lalu lintas masih sangat kurang, dengan *load factor* rata-rata 27 persen. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor sebagai sarana transportasi mereka.

Sejak tahun 2008 telah dilakukan penataan angkutan umum dengan sistem *buy the service*. Namun demikian pengoperasian angkutan umum dengan sistem *buy the service* belum mampu menjawab permasalahan pelayanan angkutan umum di DIY. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum sehingga masyarakat mempunyai minat yang tinggi dalam menggunakan angkutan umum.

Penataan sistem angkutan umum dengan sistem *buy the service* telah menghasilkan pengoperasian bus Trans Jogja sejumlah 48 buah dan telah terbangunnya 76 *shelter* yang dilengkapi dengan pemasangan jaringan komputer dan mesin *ticketing* SMTS (*Smart Mass Transit Solution*) dan prasarana lain yang mencakup enam jalur.

Ketersediaan angkutan umum di DIY selama kurun waktu 2003-2007 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.20**  
**Prasarana dan Sarana Angkutan Darat**  
**Tahun 2003-2007**

No	Jenis dan Jumlah	2003	2004	2005	2006	2007	Ket
1	Terminal Tipe C	11	11	11	11	11	Lokasi
2	Bus (AKAP)	287	365	365	365	365	Unit
3	Bus (AKDP)	1.055	1.014	1.014	1.014	1.014	Unit
4	Bus Perkotaan	582	582	582	582	582	Unit
5	Taksi	800	800	800	800	800	Unit
6	Jembatan Timbang	2	2	2	2	2	Lokasi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DIY

Prasarana jalan yang tersedia di Provinsi DIY tahun 2007 meliputi Jalan Nasional (168,81 Km), Jalan Provinsi (690,25 Km), dan Jalan Kabupaten (3.968,88 Km), dengan jumlah jembatan yang tersedia sebanyak 114 buah dengan total panjang 4.664,13 meter untuk jembatan nasional dan 215 buah dengan total panjang 4.991,3 meter untuk jembatan provinsi.

Di wilayah perkotaan, dengan kondisi kendaraan bermotor yang semakin meningkat (rata-rata tumbuh 13% per tahun), sedangkan kondisi jalan terbatas, maka telah mengakibatkan terjadinya kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas serta terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahun.

Dari sisi peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang baik telah diterbitkan Perda No. 10 Tahun 2001 yang direvisi menjadi Perda No. 1 Tahun 2008 untuk mengatur pembatasan umur kendaraan angkutan umum dan sertifikasi pengemudi angkutan umum; Perda No. 2 Tahun 2002 yang mengatur penerapan dispensasi angkutan barang, dan Perda No. 5 Tahun 2007 yang mengatur keharusan laik jalan bagi kendaraan yang beroperasi di jalan.

Selain angkutan umum, angkutan kereta api juga menjadi pilihan alat transportasi yang menghubungkan Yogyakarta dengan daerah-daerah lain di pulau Jawa. Pelayanan angkutan kereta api pemberangkatan dan kedatangan berpusat di Stasiun Kereta Api Tugu untuk kelas eksekutif dan bisnis, sedangkan Stasiun Lempuyangan untuk melayani angkutan penumpang kelas ekonomi dan barang. Saat ini untuk meningkatkan layanan jalur Timur-Barat sudah dibangun jalur ganda (*double track*) dari Stasiun Solo Balapan sampai Stasiun Kutoarjo. Berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, permasalahan yang berkaitan dengan layanan angkutan kereta api antara lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga.

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan, Waduk Sermo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki luas areal 1,57 km<sup>2</sup> dan mempunyai keliling ± 20 km menyebabkan terpisahnya hubungan lintas darat antara desa di sisi waduk dengan desa lain di seberangnya. Kondisi ini memerlukan adanya suatu sarana penyeberangan danau sehingga keberadaan angkutan danau dan penyeberangan sangat diperlukan. Untuk mendukung operasional penyeberangan, jumlah kapal yang beroperasi di Waduk Sermo untuk tahun 2007 sebanyak 10 buah dengan dukungan satu buah kapal patroli pengawasan.

Di sektor transportasi laut di Provinsi DIY terdapat Tempat Pendaratan Kapal (TPK) yang berfungsi sebagai pendaratan kapal pencari ikan dan tempat wisata pantai. Terdapat 19 titik TPK yang dilayani oleh ± 450 kapal nelayan.

Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), yang berfungsi sebagai panduan bagi kapal - kapal nelayan untuk dapat merapat ke pantai, disamping sebagai petunjuk dan bantuan navigasi daratan bagi kapal - kapal besar. Selama ini jumlah SBNP yang tersedia kurang memadai.

Di sektor transportasi udara, Bandara Adisutjipto yang telah menjadi bandara internasional sejak 2004 menjadi pintu masuk transportasi udara bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik domestik maupun internasional.

Keterbatasan fasilitas sisi udara dan darat yang berada di Bandara Adisutjipto menyebabkan fungsi Bandara Adisutjipto sebagai gerbang wilayah selatan Pulau Jawa tidak dapat optimal. Status bandara yang "*enclave civil*" menyebabkan landas pacu yang ada dimanfaatkan untuk dua kepentingan yakni penerbangan sipil dan latihan terbang militer.

Tidak adanya *Taxiway* Paralel membuat panjang landas pacu yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kenyamanan dan keamanan operasi penerbangan terganggu.

**Tabel II.21**  
**Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Adisutjipto**

No.	Jenis Fasilitas		Satuan
A.	SISI UDARA		
	- Pesawat terbesar	B 737-400	pesawat
	- Landas pacu ( <i>Runway</i> )	2.200 x 45	m
	- <i>Exit Taxiway</i>	102,5 x 30	m
	- Paralel <i>Taxiway</i>	Tidak ada	
	- Apron		
	- Pesawat <i>Narrow Body</i>	B 737 : 8	pesawat
	- Luas	28.055	m <sup>2</sup>
B.	SISI DARAT		
	- Bangunan Terminal Penumpang	8.890	m <sup>2</sup>
	- Bangunan VIP	521	m <sup>2</sup>
	- Bangunan Terminal Kargo	450	m <sup>2</sup>
	- Area Parkir Kendaraan	3.340	m <sup>2</sup>

## 2. Sumberdaya Air

Sumberdaya air utama DIY terdapat di Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo (WS Progo-Opak-Oyo) yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) Progo, DAS Opak dan DAS Serang. DAS Progo bagian hulu berada di wilayah Kabupaten Temanggung, Magelang dan Kota Magelang. Potensi sumberdaya air WS Progo-Opak-Oyo berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, mata air, sungai bawah tanah, waduk dan embung. Potensi air permukaan terkait dengan keberadaan Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Oyo dan Sungai Serang.

Sumberdaya air selama ini dimanfaatkan untuk irigasi, kebutuhan rumah tangga, industri, tenaga listrik dan penggelontoran kota. Selain itu irigasi juga digunakan untuk budidaya kolam ikan, seperti yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Kebutuhan irigasi untuk pertanian sawah dibagi dalam beberapa daerah irigasi yang tersebar di sebagian besar pemanfaatan lahan. Daerah irigasi tersebut, antara lain Progo, Manggis, Soropadan, Sumberan, Tangsi, Kalibawang, Karangtalun (*Van Der Wijck* dan Mataram), Sapon dan Simo.

Kebutuhan air untuk rumah tangga dipenuhi melalui sistem pipa air minum/bersih (sistem air pipa PDAM), sumur dan sebagian dari hidran umum. Pemanfaatan air untuk kebutuhan industri umumnya berasal dari air tanah sumur dalam, hanya sebagian kecil memakai air dan sistem suplai perpipaan. Pemanfaatan air untuk tenaga listrik mikro hidro dilakukan di Saluran *Van Der Wijck* dan Saluran Mataram dengan memanfaatkan air irigasi yang sudah ada. Pemanfaatan air untuk penggelontoran dilakukan dalam sistem penggelontoran sanitasi perkotaan dengan menggunakan air permukaan, misalnya di Kota Yogyakarta memanfaatkan air dari Selokan Mataram yang dilewatkan kali Code, di Wates, Kulon Progo, melalui Bendung Pengasih, Waduk Sermo mensuplai air guna penggelontoran kota.

Pengembangan jaringan irigasi diarahkan untuk peningkatan produktivitas lahan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Pengelolaan jaringan irigasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sektor pertanian. Produktivitas lahan yang sering terganggu dengan adanya banjir diupayakan untuk ditanggulangi melalui pengembangan prasarana pengendali banjir. Pengupayaan penyeimbangan ketersediaan air di musim penghujan dan kemarau menjadi sangat penting dilakukan untuk menjaga kontinuitas penyediaan air. Selanjutnya dalam upaya lebih memanfaatkan air sebagai sumberdaya, perlu dikembangkan berbagai usaha pemanfaatan air melalui pengembangan sumber energi mikro, budidaya perikanan, maupun untuk tujuan wisata.

Jaringan dan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY meliputi:

- a. Saluran Irigasi pada Daerah Irigasi Lintas (Saluran induk: 21,79 km, Saluran sekunder: 43,79 km, Saluran Pembuang: 20,53 km);
- b. Saluran irigasi pada DI dengan luasan 1.000 – 3.000 (Saluran induk: 24,87 km, Saluran sekunder: 96,83 km, Saluran Pembuang: 127,64 km);
- c. Daerah Irigasi (DI Lintas: 3.865 Ha, DI 1.000 – 3.000: 10.072 Ha).

Permasalahan umum dalam pengelolaan sumberdaya air di Provinsi DIY pada dasarnya terbagi menjadi 3 aspek, yaitu kelebihan air, kekurangan air dan pencemaran. Pertumbuhan penduduk yang memicu perkembangan wilayah berdampak pada meluasnya lapisan kedap air di atas permukaan tanah dan menyempitnya daerah resapan air. Fenomena ini akan berdampak pada meningkatnya daerah rawan banjir pada saat musim hujan sekaligus meningkatkan daerah rawan kekeringan pada musim kemarau. Pencemaran yang semakin tinggi akibat pertumbuhan ekonomi, industri dan jumlah penduduk turut berperan dalam menurunkan kualitas sumberdaya air.

Alih fungsi lahan yang banyak terjadi di Wilayah Propinsi DIY akibat dari perkembangan wilayah harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu keseimbangan dan ketersediaan sumberdaya air. Fungsi kawasan penyangga yang selama ini menjadi tumpuan daerah tangkapan hujan di Propinsi DIY masih kurang mendapatkan perhatian. Pengelolaan tanah yang kurang baik di daerah *upland* akan meningkatkan laju erosi yang dapat menurunkan produktifitas tanah sekaligus menurunkan kualitas dan kuantitas air. Peningkatan laju erosi ini akan meningkatkan sedimentasi yang masuk ke dalam badan sungai melebihi kapasitasnya. Hal ini terjadi akibat dari kegiatan konservasi tanah dan air yang belum dikelola dengan baik.

Terkait kelembagaan, persoalan yang muncul di sektor pengairan adalah lemahnya koordinasi antar-institusi terkait sehingga konsep *one river, one plan, one integrated management* belum dapat diterapkan dalam pengelolaan SDA.

### 3. Air Minum/Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat telah menyebabkan peningkatan kebutuhan air minum. Kebutuhan air untuk rumah tangga dipenuhi melalui sistem pipa air minum/bersih (sistem air pipa PDAM), sumur, dan air Permukaan. Ketidakseimbangan antara jumlah air yang diproduksi dengan permintaan kebutuhan air masyarakat, memerlukan upaya untuk memperoleh sumber air baku sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini kebutuhan air yang dilayani PDAM untuk perkotaan, baru mencapai 28,35% dan sisanya dilayani oleh non perpipaan, sedangkan tingkat pelayanan perkotaan dan perdesaan berkisar 55,76%. Jenis sumber air yang digunakan berasal dari mata air, air tanah, air permukaan dan sungai bawah tanah.

Permasalahan dalam penyediaan airbersih/air minum adalah terjadinya penurunan kapasitas penyediaan air dari sumber-sumber air yang digunakan antara lain disebabkan oleh berkurangnya kondisi fisik sumur dan juga diakibatkan oleh berkurangnya kapasitas akifer dalam penyediaan air karena degradasi muka air tanah.

Pemerintah DIY telah berupaya dalam penyediaan air bersih dengan program pengelolaan air baku. Melalui program ini pemerintah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan air baku, terutama daerah Gunungkidul dengan menaikkan air sungai bawah tanah di Bribin.

Pada tahun 2007 Pemerintah DIY telah mengembangkan sistem penyediaan air minum pedesaan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

#### 4. Air Limbah/Sanitasi

Di wilayah perkotaan Yogyakarta air limbah/sanitasi dikelola dengan sistem air limbah terpusat. Sistem ini terdiri atas jaringan lateral, sistem penggelontor, jaringan induk dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Dari sisi kualitas air, upaya pengendalian pencemaran air oleh limbah perlu ditingkatkan melalui pengembangan program pengelolaan air limbah terpadu. Pembangunan jaringan dan instalasi pengolahan air limbah perlu dilakukan khususnya pada kawasan industri dan permukiman. Partisipasi masyarakat perlu terus ditumbuhkembangkan melalui pembudayaan pengelolaan air limbah pada tingkatan individu, keluarga dan komunal. Tingkat pelayanan air limbah dan sanitasi di DIY telah mencapai 51,8%. Permasalahan yang timbul antara lain adalah masih banyaknya industri (industri besar dan industri kecil) yang membuang limbah ke langsung lingkungan tanpa melalui pengolahan.

#### 5. Persampahan dan Drainase

Pelayanan sampah di DIY terbatas pada wilayah perkotaan dengan jangkauan diprioritaskan pada jalan utama, perkantoran, kawasan perdagangan, permukiman padat, pasar, terminal dan rumah sakit.

Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di aglomerasi perkotaan Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul) dilakukan di TPA Piyungan dengan sistem *sanitary landfill*. Tingkat pelayanan persampahan di DIY mencapai 48,32%. Pembuangan sampah di TPA masih perlu pembenahan terkait dengan lingkungan sekitar, seperti polusi bau dan banyak lalat.

Sistem drainase di DIY masih mengandalkan keberadaan sungai-sungai yang melintas sebagai drainase induk sehingga potensi pencemaran oleh limbah dan sampah sangat besar. Untuk itu diperlukan upaya penanganan saluran drainase agar tidak mencemari air sungai. Sistem drainase ditujukan untuk menanggulangi terjadinya genangan air hujan dan pelestarian ketersediaan air tanah. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tercier.

Selain itu, pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) perlu terus dikembangkan terutama pada kawasan yang padat permukiman dan daerah kawasan tangkapan air. Sistem Pembuangan Mandiri (*individual system*) dan sistem pembuangan bersama (*communal system*) perlu terus diciptakan sebagai upaya pengelolaan air kotor agar tidak mencemari lingkungan.

Sumur resapan yang dibangun juga perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin 'menahan' air hujan di daratan sehingga dapat menjadi sumber bagi pengisian kembali air tanah.

#### 6. Perumahan dan Permukiman

Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan DIY memiliki empat kelompok kawasan permukiman yaitu lingkungan permukiman di kawasan cagar budaya, permukiman di kawasan kolonial, permukiman di bantaran sungai Code dan sungai Winongo serta permukiman di kawasan kampung kota.

Di kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) memiliki beragam pusat aktivitas kota mulai perkantoran, komersial, kebudayaan sampai dengan fungsi pendidikan. Di sektor perumahan, penyediaan perumahan kampung tradisional secara langsung menjadi pendukung tumbuhnya beragam fungsi di tengah kota. Kebutuhan rumah tahun 2007 adalah 108.256 unit sedangkan ketersediaan rumah 78.482 unit hanya memenuhi 72,50% kebutuhan rumah (*backlog* 27,50%). Kondisi rumah layak huni 54% unit dan tidak layak huni 46% dengan kepadatan penduduk 16.262 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kebutuhan rumah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul cenderung terus meningkat. Hal ini disebabkan wilayah ini memiliki fasilitas pendidikan tinggi yang banyak, merupakan wilayah migrasi masuk dari Kota Yogyakarta dan dari luar DIY dan berfungsi sebagai wilayah perkembangan kota di APY. Sedangkan kondisi perumahan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pembangunan perumahan oleh developer belum berhasil menyebarkan pemusatan kegiatan pembangunan di bagian lain dari ruang perkotaan. Pola distribusi perumahan tidak terlihat jelas dan bersifat spontan (berkembang mengelompok dan tersebar sesuai dengan keberadaan jalan dan akses). Mayoritas masyarakat penghuni koridor perkotaan memilih sistem penyediaan rumah secara individu dengan cara membangun lahan yang telah ada dibandingkan membeli rumah siap pakai.

Di wilayah pedesaan pengembangan fasilitas perumahan dan pemukiman masih terbatas disebabkan masih minimnya infrastruktur pendukung. Pengembangan fasilitas perumahan dan permukiman di pedesaan terjadi di wilayah hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pinggiran perkotaan DIY. Hal ini telah menyebabkan penurunan lahan pertanian produktif, karena terjadi alih fungsi lahan yang digunakan untuk perumahan dan permukiman.

Masalah utama bidang perumahan dan permukiman di DIY adalah kebutuhan fasilitas perumahan di perkotaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang tidak didukung oleh ketersediaan lahan di perkotaan. Ketersediaan lahan di perkotaan semakin langka sehingga menyebabkan harga lahan di wilayah perkotaan semakin mahal. Adanya kelebihan permintaan terhadap lahan perumahan di wilayah perkotaan menyebabkan kenaikan harga lahan perumahan yang luar biasa.

## 7. Komunikasi dan Informatika

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika (telekomunikasi, media dan informatika) Pemerintah DIY menetapkan kebijakan pengembangan *Jogja Cyber Province*. Pada tahun 2005 dirintis program *Digital Government Services* (DGS) yang ditindaklanjuti dengan pengeluaran Peraturan Gubernur DIY nomor 42 tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*.

Dalam rangka menjalin interkoneksi antar-instansi di lingkungan pemerintah Provinsi, mulai tahun 2004 sampai 2008 telah dibangun 66 titik sambungan sehingga semua instansi sudah terintegrasi dalam satu sistem. Sejak tahun 2004 telah disusun berbagai *software* yaitu Sistem Informasi Kependudukan, Penyusunan Aplikasi Kearsipan, Penyusunan Aplikasi Perpustakaan, Pengelolaan SIMPEG, Penyusunan Aplikasi Komunikasi Internal, Penyusunan Aplikasi Mobile Yogya, Pengembangan Aplikasi dan Konversi Data Sistem Kesamsatan, Penyusunan Sistem Aplikasi Air Bawah Tanah, Aplikasi SDM TI, serta Keamanan SIMPEG. Data base pendukung layanan e-Gov juga terus dikembangkan, seperti database Agricenter, pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, ATLAS Sumberdaya Wilayah serta *Multimedia Library*.

Indikator kinerja pengembangan e-Gov di DIY dapat dilihat dari prestasi yang diraih pada Warta Ekonomi Award. Sejak tahun 2003 Pemerintah DIY mendapat penghargaan baik sebagai peringkat I (2003, 2004, dan 2006), peringkat II (2005) dan peringkat III (2007). Pada tahun 2006, DIY mendapat predikat *best of the best* dalam layanan e-Gov.

Layanan unggulan berbasis IT juga terus dikembangkan, diantaranya adalah *Jogja Bisnis* untuk melayani masyarakat di bidang perdagangan dan investasi, serta *Jogja Belajar* untuk memberikan layanan bidang pendidikan sehingga kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan semakin berkurang karena siswa dan lembaga sekolah memperoleh akses yang sama terhadap informasi dan perkembangan dunia pendidikan. Di samping itu juga terus dikembangkan kemampuan akses informasi masyarakat melalui pengenalan dan pelatihan akses, terutama kelompok masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan IT.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara terpadu kepada masyarakat, pemerintah DIY juga telah membangun Plaza Informasi sebagai bentuk layanan dengan konsep *One Stop Information Services*. Selama tahun 2007 kunjungan masyarakat ke Plaza Informasi mencapai 23.624 orang.

Untuk mendukung predikat Yogya sebagai kota pendidikan, Pemerintah DIY saat ini mengelola dan mengembangkan *Jogja Study Centre* (Pusat Studi Yogya) yang diharapkan dapat menjadi pusat studi pelajar dan masyarakat, pusat kegiatan pendidikan, pusat diskusi pendidikan, pusat pertemuan pemikiran kemajuan pendidikan dan kemajuan bangsa serta Negara Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi, PT Telkom berusaha menambah kapasitas sentral telepon setiap tahun. Walau jumlah penyediaan telepon umum menurun, tetapi jumlah pelanggan telepon seluler meningkat.

Dalam konteks pengembangan pemanfaatan sektor komunikasi dan informatika, permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya ketersediaan *database* dan sistem aplikasi yang diperlukan untuk *updating* data; SDM yang sudah memperoleh pendidikan dan latihan di bidang IT banyak yang belum dimanfaatkan sesuai kompetensinya karena belum adanya kesamaan persepsi dari instansi dalam pemanfaatan IT untuk mendukung proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu belum optimalnya penyediaan *one stop information service* khususnya dalam pelayanan terhadap wisatawan melalui kerjasama antara pengelola tempat wisata, pengelola transportasi termasuk *travel agent* dan hotel.

## F. Struktur dan Pola Ruang

Untuk menangani masalah keruangan dalam pembangunan di DIY untuk masa 2002–2007, bertumpu pada pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu (*comprehensive and integrated development*). Pendekatan ini memberikan perhatian pada sektor dan kawasan yang mendukung sektor dan kawasan prioritas serta memberikan perhatian pula pada sektor dan kawasan yang menerima dampak dari sektor dan kawasan prioritas tersebut. Pendekatan ini masih layak untuk dimanfaatkan pada masa 2002–2007.

Model yang digunakan dalam tata ruang wilayah DIY adalah "*corridor development*" atau disebut dengan "pemusatan intensitas kegiatan manusia pada suatu koridor tertentu" yang berfokus pada Kota Yogyakarta dan jalan koridor sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek pengendalian dan pengarahan pembangunan dilakukan lebih menonjol dalam koridor prioritas, terhadap kegiatan investasi swasta, dibandingkan dengan investasi pembangunan oleh pemerintah yang dengan sendirinya harus terkendali.

Secara umum, arahan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan koridor perkotaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan non pertanian di luar pusat-pusat pelayanan (pola ekstensif) diarahkan ke lahan kurang subur (tegalan), terutama ke bagian barat dan barat daya (Sedayu, Gamping, Pajangan, Kasihan).
2. Pengembangan kegiatan non pertanian di lahan perkarangan/permukiman (pola intensif).
3. Lahan-lahan pertanian produktif, diusahakan untuk tetap berfungsi sebagai budi daya pertanian.

Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah DIY, maka diarahkan pengembangan pusat-pusat pelayanan antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Kota Yogyakarta, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sleman, PKW Bantul, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kondisi karakteristik DIY secara langsung mempengaruhi perkembangan DIY. Perubahan guna lahan terbangun sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 terus mengalami peningkatan. Lahan sawah pada tahun 1990 yang mencapai 19,86% berkurang menjadi 14,74% pada tahun 2006. Sedangkan guna lahan permukiman yang pada tahun 1990 berjumlah 15,74% terus mengalami peningkatan. Penetrasi guna lahan permukiman tersebut sampai dengan tahun 2006 terus terjadi di sekitar pusat Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam tata ruang adalah alih fungsi lahan pertanian subur di kawasan lahan basah untuk kepentingan non pertanian, yang berdampak pada sulitnya pengendalian konversi lahan.

## G. Pemerintahan, Hukum dan Politik

### 1. Pemerintahan

Dalam bidang kerjasama, kemajuan daerah terkait erat dengan jalinan kemitraan yang dilakukan oleh daerah dalam rangka meningkatkan kemanfaatan posisi dan potensi yang dimiliki sebagai salah satu upaya untuk kemajuan bersama dengan mitra yang ada sebagai konsekuensi dibangunnya kemitraan yang baik.

Dalam era globalisasi kegiatan kerjasama merupakan suatu tuntutan dan perlu dilakukan karena dalam dimensi global satu negara/daerah dengan negara/daerah lain mempunyai keterkaitan dan tidak ada satu negara/daerah yang mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sangat kompleks dan dinamis.

Saat ini Pemerintah Provinsi telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan/Swasta berjumlah 174 kerjasama. Kerjasama dengan Luar Negeri dilakukan dalam bentuk *Sister Province* dan kerjasama teknis. Dari segi intensitas, beberapa kerjasama masih aktif dan efektif dilaksanakan, sedangkan sebagian lagi masih kurang aktif sehingga diperlukan peninjauan kembali dari aspek pelaksanaan maupun dari aspek ruang lingkup.

Di bidang pengembangan kelembagaan, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi DIY telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY; serta menerapkannya mulai tahun 2009.

Dari sisi sumberdaya aparatur jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Golongan I, Golongan II dan Golongan III terjadi penurunan jumlah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah di bidang kepegawaian yaitu *Zero Growth*, karena penambahan pegawai bukan atas dasar formasi tetapi dari penggantian pegawai yang telah pensiun.

### 2. Hukum

Aspek Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparatur pemerintah DIY untuk bersikap secara profesional dan lebih responsif akan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik. Di bidang budaya hukum, lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di samping itu, kurangnya sosialisasi peraturan pada masyarakat maupun aparatur pemerintah menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang sehingga muncul anarkisme.

### 3. Politik

Kondisi politik di DIY cukup kondusif, yang didukung oleh posisi Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya, serta adanya nilai-nilai keistimewaan dan peran kultural yang ada di pemerintahan, peran birokrasi, peran orsospol, serta organisasi kemasyarakatan yang berjalan sesuai fungsinya.

Pemilu tahun 2004 berjalan dengan demokratis, aman dan tertib serta menghasilkan wakil rakyat yang *legitimate*. Jumlah anggota DPRD DIY hasil pemilu 2004 adalah 55 orang, yang terdiri 50 (lima puluh) orang laki-laki (91%) dan 5 (lima) orang perempuan (9%), yang berasal dari 9 (sembilan) partai.

Sebagai masyarakat di kota pendidikan, tingkat kesadaran politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat DIY cukup tinggi, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap politik dan pemerintahan juga cukup tinggi. Dinamika politik di DIY juga diwarnai oleh daya kritis dari pelajar dan mahasiswa serta masyarakat yang tercermin dalam banyaknya ormas/LSM/lembaga-lembaga pemberdayaan politik masyarakat dan frekuensi demonstrasi.

Meskipun demonstrasi sering mewarnai dinamika politik Yogyakarta, namun senantiasa berjalan dengan damai. Hal ini tidak terlepas dari hubungan yang sinergis dari berbagai aktor, baik pemerintah, partai politik, LSM, maupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mampu meminimalisir konflik dalam masyarakat. Apalagi dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan terjadi perubahan paradigma peran pemerintah, dari pembina orsospol dan ormas menjadi peran regulator, fasilitator dan pelayanan publik.

Kondisi politik di DIY tidak terlepas dari kondisi politik di tingkat nasional. Dengan semakin banyaknya partai politik dalam pemilu 2009 merupakan tantangan pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang dinamis, aman dan damai. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, meskipun angka partisipasi masih cukup tinggi (84%) pada pemilu legislatif 2004, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan pilkada kabupaten/kota menurun yaitu 76%. Menurunnya tingkat partisipasi politik bisa berarti semakin tingginya daya kritis masyarakat namun bisa pula berarti semakin tingginya apatisme masyarakat.

## BAB III

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

#### A. Lingkungan Hidup

##### 1. Peluang

- a. Kondisi geografis Provinsi DIY yang sebagian besar merupakan daratan *aluvial* hasil erupsi Gunung Merapi yang subur dan ditambah adanya 3 DAS yaitu Progo, Opak, Oyo menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat.
- b. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

##### 2. Tantangan

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi DIY memiliki tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon);
- b. Laju pencemaran/kerusakan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta akibat dinamika kegiatan rumah tangga, ekonomi, transportasi dan pembangunan;
- c. Perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjaga serta terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

##### 3. Isu Strategis

Tantangan-tantangan tersebut di atas menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain meliputi:

- a. Pengelolaan sampah mandiri.
- b. Pengembangan bio energi.
- c. Pelaksanaan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*).
- d. Penanaman sejuta pohon.
- e. Pembuatan SPAH.
- f. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
- g. Pencemaran air sungai oleh limbah cair, pestisida dan sampah.
- h. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
- i. Pencemaran udara dari sumber bergerak.
- j. Penurunan estetika lingkungan.
- k. Kerusakan/perubahan bentang lahan, *karst*, gumuk pasir dan pantai.
- l. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
- m. Pelanggaran tata ruang.
- n. Penambangan liar bahan galian golongan C.
- o. Pencemaran air laut.

## B. Perekonomian Daerah

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

#### a. Peluang

- 1) Kinerja perekonomian Provinsi DIY yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif.
- 2) Peluang perkembangan perekonomian di DIY juga ditunjang oleh kenyataan bahwa DIY menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta.
- 3) Sebagai daerah tujuan bagi orang tua mengirim anaknya untuk memperoleh pendidikan berkualitas di DIY memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY. Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
- 4) Kinerja pemerintahan yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah.

#### b. Tantangan

- 1) Kebijakan otonomi daerah berdampak penurunan animo masyarakat luar daerah untuk studi di DIY.
- 2) Krisis finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensi PHK massal serta penurunan perekonomian DIY.
- 3) Pergeseran sistem nilai dan lunturnya kearifan lokal yang mempengaruhi citra DIY sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota tujuan wisata.

#### c. Isu Strategis

- 1) Ketahanan kinerja PDRB terhadap krisis finansial global.
- 2) Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2009 sampai dengan 2010 sedikit akan mengalami penurunan sebagai dampak krisis finansial global, yang akan mengakibatkan ekspor beberapa jenis komoditas akan mengalami kelesuan, sehingga produsen akan mengurangi produksi dan kemungkinan terjadi PHK. Para pengusaha juga akan menunda berinvestasi karena tingkat bunga cukup tinggi menyusul kenaikan BI rate yang berpengaruh terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman. Sedangkan Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2011 sampai dengan 2013 akan mengalami kenaikan meskipun masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yaitu sebesar 5,02%.

Secara kuantitatif proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**  
**Tahun 2009-2013**

TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,0	4,7 - 5,2	4,9 - 5,4	5,2 - 5,7	5,4 - 5,9

Sumber: BPS Provinsi DIY Tahun 2008

## 2. Investasi

### a. Peluang

- 1) Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dengan Slogan “*Jogja Invest*” yang terbuka untuk investor.
- 3) Ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing.

### b. Tantangan

- 1) Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil.
- 2) Investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan.
- 3) Optimalisasi iklim investasi.
- 4) Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
- 5) Regulasi yang mantap dalam hal fasilitasi investasi.
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

### c. Isu Strategis

- 1) Persaingan global dengan provinsi dan negara lain yang lebih maju.
- 2) Penyediaan fasilitas “*tax holiday*” guna peningkatan daya saing.
- 3) Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Yogyakarta.
- 4) Sistem pelayanan investasi dengan melalui teknologi informasi.
- 5) Advokasi legislatif tingkat nasional dan daerah.

**Tabel III.2**  
**Proyeksi PMA dan PMDN**  
**Tahun 2009-2013**

<b>TAHUN</b>	<b>PMA (Rp. Juta)</b>	<b>PMDN (Rp. Juta)</b>
<b>2009</b>	4.155.560	2.529.247
<b>2010</b>	4.618.074	2.540.122
<b>2011</b>	5.132.066	2.551.045
<b>2012</b>	5.703.265	2.562.014
<b>2013</b>	6.338.038	2.573.031

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

## 3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

### a. Peluang

- 1) Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri.
- 2) Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
- 3) Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
- 4) Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain.
- 5) Tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
- 6) Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.

b. Tantangan

- 1) Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
- 2) Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.
- 3) Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.

c. Isu Strategis

- 1) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.
- 2) Proyeksi jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksi di sektor IKM seperti tersebut di bawah ini.

**Tabel III.3**  
**Proyeksi Perkembangan Sektor Industri**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Unit usaha	76.267	76.561	76.856	77.153	77.450
2	Tenaga kerja (orang)	273.621	274.676	275.735	276.798	277.865
3	Nilai investasi (Rp milyar)	769,275	772,240	775,217	778,206	781,206
4	Nilai produksi (Rp milyar)	2.800,905	2.811,703	2.822,543	2.833,425	2.844,349
5	Nilai bahan (Rp milyar)	1.258,224	1.263,075	1.267,945	1.272,833	1.277,741

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

**Tabel III.4**  
**Proyeksi Sektor Perdagangan (Ekspor - Impor)**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ekspor:</b>						
1	Volume (juta kg)	40,58	40,74	40,89	41,05	41,21
2	Nilai (juta US\$)	130,25	130,75	131,26	131,76	132,27
3	Komoditi	103	103	104	104	105
4	Negara	97	97	98	98	99
5	Eksportir	256	257	258	259	260
<b>Impor:</b>						
1	Volume (juta kg)	8,86	8,89	8,93	8,96	9,00
2	Nilai (juta US\$)	50,71	50,91	51,10	51,30	51,50
3	Komoditi	25	25	25	25	25
4	Negara	24	24	24	24	24
5	Importir	17	17	17	17	17

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

**Tabel III.5**  
**Proyeksi Sektor Koperasi dan UKM**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Koperasi:</b>						
1	Aktif	1.469	1.475	1.480	1.486	1.492
2	Tidak Aktif	721	724	727	729	732
	<i>Total</i>	<i>2.190</i>	<i>2.199</i>	<i>2.207</i>	<i>2.215</i>	<i>2.224</i>
3	Modal Sendiri	319.516	320.748	321.984	323.226	324.472
4	Modal Luar	358.544	359.927	361.314	362.707	364.106
<b>UKM:</b>						
1	Aneka Usaha	2.557	2.567	2.577	2.587	2.597
2	Perdagangan	4.792	4.810	4.829	4.848	4.866
3	Industri Pertanian	1.691	1.698	1.704	1.711	1.717
4	Industri Non Pertanian	2.050	2.058	2.066	2.074	2.082
	<i>Total</i>	<i>11.090</i>	<i>11.133</i>	<i>11.176</i>	<i>11.219</i>	<i>11.262</i>

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

#### 4. Pertanian

##### a. Peluang

- 1) Peningkatan daya saing produk pertanian.
- 2) Pengembangan komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi.
- 3) Pengembangan varietas unggul daerah .
- 4) Pengembangan *Jogja Seed Centre*.
- 5) Peningkatan nilai tambah produk pertanian.
- 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan.

##### b. Tantangan

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- 2) Potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan.
- 3) Minimnya modal usaha petani.
- 4) Impor beberapa jenis komoditas pertanian.
- 5) Peningkatan kualitas SDM.

##### c. Isu Strategis

- 1) Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan).
- 2) Menurunnya daya dukung lahan dan air.
- 3) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan global.
- 4) Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian. Berikut ini tabel proyeksi luas areal sektor pertanian.

**Tabel III.6**  
**Proyeksi Luas Areal Sektor Pertanian (Ha)**  
**Tahun 2009-2013**

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Padi	133.500	133.700	133.800	133.876	133.888
2.	Jagung	70.200	70.400	70.500	70.575	70589
3.	Kedelai	29.300	29.500	29.700	46.148	46865
4.	Kacang Tanah	66.700	66.800	66.900	67.040	67134
5.	Kacang Hijau	870	880	890	904	913
6.	Ubi Kayu	60.900	61.000	61.200	61.340	61488
7.	Ubi Jalar	575	580	590	595	602

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi DIY

Proyeksi produksi komoditas pertanian secara relatif juga stabil mengingat intensitas pertanian di DIY relatif dapat mempertahankan produktivitas lahan pertanian. Berikut proyeksi jumlah produksi sektor pertanian.

**Tabel III.7**  
**Proyeksi Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Ton)**  
**Tahun 2009-2013**

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Padi	711.000	712.000	712.300	712.460	712.658
2.	Jagung	260.000	265.000	270.000	269.700	271.512
3.	Kedelai	40.000	40.500	41.000	42.700	42.819
4.	Kacang Tanah	57.200	57.400	57.500	57.600	57.707
5.	Kacang Hijau	570	580	590	592	600
6.	Ubi Kayu	990.000	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.165.000
7.	Ubi Jalar	6.150	6.200	6.250	6.300	6.350

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

**Tabel III.8**  
**Proyeksi Jumlah Produksi Buah-buahan (Kwintal)**  
**Tahun 2009-2013**

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Mangga	33.669	34.006	34.346	34.690	35.037
2.	Rambutan	19.257	19.645	19.645	19.841	20.039
3.	Jeruk	2.375	2.405	2.435	2.465	2.496
4.	Durian	5.384	5.438	5.492	5.547	5.603
5.	Manggis	1.042	1.052	1.062	1.073	1.084
6.	Pisang	57.661	58.238	58.820	59.408	60.002
7.	Salak	60.970	62.037	63.123	64.228	65.351
8.	Semangka	11.836	11.895	11.954	12.014	12.074

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

Sementara itu, untuk proyeksi populasi ternak besar, kecil dan unggas di Provinsi DIY ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel III.9**  
**Proyeksi Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas (Ekor)**  
**Tahun 2009-2013**

No	Jenis Ternak	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Sapi Potong	275.227	284.526	294.257	304.448	315.125	3,46
2.	Sapi Perah	6.573	6.992	7.439	7.914	8.421	6,40
3.	Kuda	1.423	1.486	1.552	1.622	1.694	4,46
4.	Kerbau	4.857	4.905	4.954	5.004	5.054	1,00
5.	Babi	8.824	9.334	9.883	10.474	11.108	5,97
6.	Kambing	304.733	310.802	317.142	323.766	330.693	2,09
7.	Domba	121.800	125.299	128.911	132.640	136.490	2,89
8.	Ayam Buras	4.020.164	4.070.647	4.121.804	4.173.642	4.226.172	1,26
9.	Ayam Ras Petelur	2.810.746	2.945.612	3.088.602	3.088.602	3.401.285	4,91
10.	Ayam Ras Pedaging	5.707.776	6.202.028	6.739.189	7.322.993	7.957.499	8,66
11.	Itik	478.963	511.285	546.179	583.864	624.852	6,90

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

## 5. Ketahanan Pangan

### a. Peluang

- 1) Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat.
- 2) Pemerataan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat.
- 3) Diversifikasi pangan berbasis potensi pangan lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- 5) Kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan (ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan).

### b. Tantangan

- 1) Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan.
- 2) Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan produktif.
- 3) Relatif masih besar ketergantungan akan bahan pangan dan bahan baku untuk produksi pangan dari luar negeri (*food trap*).
- 4) Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum di sepanjang jalur distribusi pangan.
- 5) Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan.
- 6) Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, dan bergizi.
- 7) Menurunnya kinerja penyuluhan sebagai dampak dari menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.

c. Isu Strategis

- 1) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana (kronis dan transien).
- 2) Krisis ekonomi global yang berdampak pada krisis pangan.
- 3) Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
- 4) Bahan *addictive* pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan.
- 5) Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa.
- 6) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
- 7) Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar.
- 8) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana (kronis dan transien).
- 9) Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

## 6. Kehutanan dan Perkebunan

a. Peluang

- 1) Optimalisasi lahan pekarangan, kebun dan lahan kering yang potensial untuk hutan rakyat.
- 2) Multifungsi hutan bagi kehidupan manusia meliputi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial.
- 3) Terbukanya peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- 4) Terbukanya peluang pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung pendidikan, budaya dan kepariwisataan.
- 5) Terbukanya peluang pengembangan agribisnis perkebunan.
- 6) Terbukanya pangsa pasar produk kehutanan dan perkebunan.
- 7) Kepedulian kelompok masyarakat di dalam peningkatan pelestarian hutan.
- 8) Terbukanya peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kebun.
- 9) Terbukanya peluang pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi.

b. Tantangan

- 1) Luas hutan yang masih minim dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem.
- 2) Sebagai sumber pendapatan petani kebun dan masyarakat sekitar hutan.
- 3) Berlangsungnya arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan hasil hutan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan rendah.
- 5) Kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan belum berkembang secara produktif.
- 6) Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan.
- 7) Daya saing produk perkebunan primer maupun hasil olahannya belum mampu bersaing.
- 8) Peredaran benih hutan/perkebunan yang belum bersertifikat/ berlabel masih tinggi.

c. Isu Strategis

- 1) Kelestarian fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai upaya penurunan pemanasan global.
- 2) Rendahnya daya saing produk perkebunan.

- 3) Peranan kehutanan dan perkebunan di dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha.
- 4) Dukungan penyediaan bahan baku penghasil biofuel sebagai pengganti bahan bakar minyak, peningkatan swasembada gula dan mengurangi impor kapas untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil.
- 5) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air dan ekosistem.
- 6) Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan.
- 7) Proyeksi luas areal sektor kehutanan, khususnya luas areal hutan negara dari tahun ke tahun tetap, sedangkan untuk luas areal hutan rakyat diproyeksikan mengalami peningkatan. Berikut ini disajikan tabel proyeksi luas areal sektor kehutanan dan perkebunan di DIY.

**Tabel III.10**  
**Proyeksi Luas Areal Sektor Kehutanan dan Perkebunan DIY (Ha)**  
**Tahun 2009-2013**

No.	Komoditas/Hutan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kelapa	44.223,38	44.358,55	44.493,72	44.628,89	44.764,06
2.	Jambu Mete	21.613,02	21.679,08	21.745,14	21.811,20	21.877,26
3.	Kakao	4.388,23	4.401,64	4.415,05	4.428,46	4.441,87
4.	Kopi	1.611,87	1.616,80	1.621,73	1.626,66	1.631,59
5.	Teh	139,61	140,04	140,47	140,90	141,33
6.	Tebu	6.578,86	6.598,97	6.619,08	6.639,19	6.659,30
7.	Tembakau	1.678,82	1.683,95	1.689,08	1.694,21	1.699,34
8.	Hutan Rakyat	60.360,88	61.460,76	62.560,64	63.660,52	64.760,40

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

**Tabel III.11**  
**Proyeksi Jumlah Produksi Sektor Kehutanan dan Perkebunan DIY (Ton)**  
**Tahun 2009-2013**

No	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kelapa	53.955,10	55.340,75	56.726,40	58.112,05	59.497,70
2.	Jambu Mete	907,10	1.171,34	1.435,58	1.699,82	1.964,06
3.	Kakao	1.029,79	1.083,77	1.137,75	1.191,73	1.245,71
4.	Kopi	410,91	425,06	439,21	453,36	467,51
5.	Teh	231,57	232,28	232,99	233,70	234,41
6.	Tebu	16.870,77	17.640,52	18.410,27	19.180,02	19.949,77
7.	Tembakau	1.187,61	1.191,24	1.194,87	1.198,50	1.202,13
8.	Daun Kayu Putih	4.300	4.325	4.350	4.375	4.400
9.	Jati *	88.360,65	89.924,95	91.489,25	93.053,55	94.617,85
10	Mahoni *	16.004,17	16.287,50	16.570,83	16.854,16	17.137,49
11	Akasia *	2.370,26	2.412,22	2.454,18	2.496,14	2.538,10
12	Sono *	6.861,67	6.983,15	7.104,63	7.226,11	7.347,59
13	Sengon *	8.256,24	8.402,41	8.548,58	8.694,75	8.840,92

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

Ket : \* (Produksi hutan rakyat / M3)

## 7. Perikanan dan Kelautan

### a. Peluang

- 1) Potensi perikanan budidaya masih terbuka dan perikanan tangkap masih cukup besar di jalur II.
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Provinsi DIY.
- 3) Adanya tempat-tempat pendaratan ikan dan pelabuhan.
- 4) Pemasaran produk perikanan domestik maupun luar negeri.

### b. Tantangan

- 1) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman alat tangkap ikan.
- 2) Peningkatan modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan.
- 3) Stabilisasi harga produk perikanan.
- 4) Peningkatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil tangkapan ikan.
- 5) Minimalisasi hama dan penyakit pada perikanan budidaya.
- 6) Peningkatan minat dan budaya melaut bagi masyarakat DIY.
- 7) Peningkatan SDM perikanan.

### c. Isu Strategis

- 1) Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan.
- 2) Optimalisasi pengelolaan pelabuhan.
- 3) Penegasan batas teritorial wilayah penangkapan.
- 4) Potensi usaha ikan hias yang semakin diminati.
- 5) Potensi terjadinya *illegal fishing*.
- 6) Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia. Berikut ini ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di DIY.

**Tabel III.12**  
**Target Pembangunan Perikanan dan Kelautan**  
**Tahun 2009-2013**

No	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Produksi (Ton)	23.921	26.437	30.278	35.213	39.460
	▪ Perikanan Budidaya	18.669	20.743	24.239	28.338	32.035
	▪ Perikanan Tangkap	5.252	5.694	6.039	6.875	7.425
2.	Ikan Masuk (Ton)	44.717	43.500	42.600	41.350	39.070
3.	Ikan Keluar (Ton)	1.586	1.760	1.970	2.350	2.750
4.	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (Ton)	67.052	68.177	70.908	74.213	75.780
5.	Jumlah Penduduk DIY (jiwa)	3.653.465	3.654.465	3.655.822	3.656.556	3.641.268
6.	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	18,35	18,66	19,40	20,3	20,81

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY

## 8. Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Peluang
  - 1) Sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di DIY, khususnya bahan galian golongan C yang jumlahnya melimpah belum diusahakan secara optimal.
  - 2) Ketersediaan sumberdaya alam dalam hal ini air, angin, matahari, ombak yang melimpah merupakan potensi yang baik bagi pengembangan energi ketenagalistrikan.
- b. Tantangan
  - 1) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan bagi eksploitasi bahan galian.
  - 2) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan.
  - 3) Melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
- c. Isu Strategis
  - 1) Alih teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian.
  - 2) Pemanfaatan sumberdaya alam untuk ketenagalistrikan.
  - 3) Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 9. Pariwisata

- a. Peluang
  - 1) Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
  - 2) Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
  - 3) Kedudukan dan peran Provinsi DIY sebagai destinasi unggulan wisatawan.
  - 4) Keanggotaan Provinsi DIY pada lembaga-lembaga pariwisata dunia.
  - 5) Perkembangan kemapanan perekonomian negara/daerah lain.
  - 6) Kecenderungan wisatawan Eropa untuk ke Asia Pasifik.
  - 7) Tingginya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
  - 8) Adanya kebijakan politik Pemerintah Provinsi DIY untuk menjadikan Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.
- b. Tantangan
  - 1) Kompetisi market pariwisata yang ketat.
  - 2) Peningkatan berkelanjutan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata.
  - 3) Peningkatan daya saing ODTW.
  - 4) Peningkatan kualitas SDM pariwisata
- c. Isu Strategis

Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal.

Proyeksi kunjungan Wisatawan ke DIY diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan tahun-tahun mendatang dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di DIY mantap. Kondisi tersebut juga didukung dengan semakin baiknya citra serta kepercayaan calon wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap DIY. Di samping itu juga tidak diharapkan terjadinya bencana alam, *travel warning*, isu wabah penyakit, tingginya nilai tukar mata uang asing, dan sebagainya yang sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan.

**Tabel III.13**  
**Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisatawan**  
**Tahun 2009-2013**

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2009	141.426	9,92	1.271.707	10,00
2010	155.678	10,08	1.398.877	10,00
2011	171.425	10,12	1.538.765	10,00
2012	188.369	9,88	1.692.642	10,00
2013	207.205	10,00	1.861.906	10,00

Sumber: Baparda DIY Tahun 2007

## C. Sosial Budaya Daerah

### 1. Kependudukan

#### a. Peluang

- 1) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,1% per tahun merupakan peluang untuk memudahkan manajemen kependudukan.
- 2) Cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### b. Tantangan

Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

#### c. Isu Strategis

Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

**Tabel III.14**  
**Proyeksi Penduduk Provinsi DIY (Jiwa)**  
**Tahun 2009-2013**

2009	2010	2011	2012	2013
3.501.900	3.534.600	3.566.600	3.597.900	3.628.500

Sumber: BPS DIY

### 2. Ketenagakerjaan

#### a. Peluang

- 1) Ketersediaan angkatan kerja terdidik.
- 2) Berkembangnya sektor jasa yang berpotensi menyerap tenaga kerja.

- b. Tantangan
  - 1) Perluasan lapangan kerja.
  - 2) Pengurangan pengangguran.
- c. Isu Strategis
  - 1) Perluasan kesempatan kerja.
  - 2) Peningkatan kualitas angkatan kerja.

**Tabel III.15**  
**Proyeksi Angkatan Kerja (Jiwa)**  
**Tahun 2009-2013**

2009	2010	2011	2012	2013
2.030.775	2.075.988	2.121.200	2.166.413	2.211.626

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

**Tabel III.16**  
**Proyeksi Penduduk Bekerja (Jiwa)**  
**Tahun 2009-2013**

2009	2010	2011	2012	2013
1.904.830	1.945.633	1.986.435	2.027.238	2.068.041

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

**Tabel III.17**  
**Proyeksi Penduduk Menganggur (Jiwa)**  
**Tahun 2009-2013**

2009	2010	2011	2012	2013
125.945	130.355	134.765	139.175	143.585

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

### 3. Transmigrasi

- a. Peluang
  - 1) Masih adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.
  - 2) Menguatnya kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan dan penanganan transmigrasi.
- b. Tantangan
  - 1) Semakin berkurangnya daerah tujuan transmigrasi seiring dengan berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW sesuai rencana masing-masing daerah.
  - 2) Berkembangnya sektor informal yang dapat mengurangi animo masyarakat untuk bertransmigrasi.
- c. Isu Strategis
  - 1) Perlunya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran.
  - 2) Perlu adanya jaminan yang lebih konkrit tentang peningkatan kesejahteraan calon transmigran, sehingga bukan semata-mata guna pemerataan persebaran penduduk.

#### 4. Kesejahteraan Sosial

- a. Peluang
  - 1) Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan ruang gerak masyarakat dalam menghadapi permasalahannya.
  - 2) Banyaknya sektor informal tumbuh di masyarakat.
  - 3) Mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Tantangan
  - 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan sumberdaya ekonomi.
  - 2) Menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat melalui sektor formal maupun informal.
- c. Isu Strategis  
Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Proyeksi jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY sebagai berikut.

**Tabel III.18**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin DIY (Jiwa)**  
**Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase
2009	599,20	17,11
2010	582,10	16,47
2011	565,00	15,84
2012	547,90	15,23
2013	530,80	14,63

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY

#### 5. Kesehatan

- a. Peluang
  - 1) Ketersediaan prasarana sarana, dan sumberdaya kesehatan memadai.
  - 2) Sarana transportasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.
  - 3) Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, desa siaga, poskestren, dan lain-lain telah berkembang dan berjalan dengan baik.
  - 4) Ketersediaan balai pelatihan kesehatan yang telah berstandar ISO 9001:2000.
  - 5) DIY sebagai pusat pendidikan termasuk sebagai rujukan dalam pendidikan, pelatihan dan konsultasi kesehatan.
  - 6) Peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan berkembang.
- b. Tantangan
  - 1) Tiga beban ganda penyakit di DIY yaitu masih tingginya penyakit menular, munculnya penyakit tidak menular sebagai pembunuh tertinggi serta munculnya penyakit-penyakit baru berpotensi wabah.

- 2) Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
- 3) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- 4) Belum meratanya SDM dan sarana pelayanan kesehatan.
- 5) Belum maksimalnya peranserta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan.

c. Isu Strategis

- 1) Derajat Kesetaraan:
  - a) Kesetaraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilayah di Asia Tenggara;
  - b) Permasalahan kesehatan ibu di DIY;
  - c) Permasalahan Status Gizi Balita DIY;
  - d) Peningkatan kematian akibat penyakit tidak menular di DIY;
  - e) Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di DIY masih tinggi;
- 2) Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan:
  - a) Mutu pelayanan kesehatan;
  - b) Sinergisme dan harmonisasi pembangunan kesehatan;
  - c) Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan;
  - d) Pembiayaan kesehatan pemerintah untuk kesehatan masih rendah;
  - e) Kemandirian dan peranserta masyarakat masih belum optimal;
- 3) DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.

## 6. Pendidikan

a. Peluang

- 1) Provinsi DIY dikenal sebagai pusat pendidikan.
- 2) Banyaknya SDM yang berkecimpung di dunia pendidikan.
- 3) Interaksi sosial yang cukup intensif di masyarakat.
- 4) Ketersediaan Sarana Teknologi Informasi.
- 5) Apresiasi Masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi.

b. Tantangan

- 1) Dampak negatif dari adanya interaksi sosial dan globalisasi.
- 2) Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman yang komprehensif antar *stakeholders* untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan menuju *Center of Excellence Cultural*.
- 3) Adanya kecenderungan orientasi bisnis dalam penyelenggaraan pendidikan.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan pemerataan mutu pendidikan.
- 2) Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal.
- 3) Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.

## 7. Kebudayaan

- a. Peluang
  - 1) DIY masih dimungkinkan ditata menjadi kawasan berbudaya terkemuka yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman serta memiliki peluang besar untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat budaya.
  - 2) Kraton sebagai pusat budaya Jawa masih mempunyai posisi yang kuat.
  - 3) Pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai media membangun jejaring global dan internasional.
  
- b. Tantangan
  - 1) Kawasan dan benda cagar budaya terganggu fungsi dan makna filosofinya karena perkembangan ekonomi dan aktivitas manusia.
  - 2) Masuknya nilai-nilai dan kebudayaan asing yang cukup gencar perlu disikapi dengan bijak agar tidak melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal.
  - 3) Antisipasi dampak negatif dari pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi.
  
- c. Isu Strategis

Peningkatan ketahanan budaya.

## 8. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja

- a. Peluang
  - 1) Potensi SDM perempuan dalam pembangunan.
  - 2) Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan, sehingga dapat meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
  - 3) Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.
  - 4) Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.
  
- b. Tantangan
  - 1) Membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran.
  - 2) Pengarusutamaan *gender* yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundangan yang tidak bias *gender* dan tidak mendiskriminasi kaum perempuan.
  - 3) Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis.
  - 4) Menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak juga remaja.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan dan perluasan kesetaraan *gender* yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya.
- 2) Peningkatan kesadaran dan kepekaan *gender* melalui pengembangan jejaring (*networking*) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka *gender*.
- 3) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja.
- 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

**Tabel III.19**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk**  
**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DIY (%)**  
**Tahun 2009-2012**

Kelompok Umur (tahun)	2009		2010		1011		1012	
	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>00-09</b>	11,28	11,18	11,28	11,48	11,19	11,57	11,30	11,65
<b>10-19</b>	12,69	10,62	12,57	10,31	12,60	10,45	12,60	10,41
<b>20-29</b>	17,13	16,81	17,10	16,51	17,17	16,61	17,08	16,59
<b>30-39</b>	16,86	16,05	16,36	16,15	16,68	16,17	16,70	16,13
<b>40-49</b>	12,42	12,06	12,57	12,17	12,36	12,19	12,32	12,19
<b>50-59</b>	9,11	9,05	9,22	9,01	9,30	9,00	9,27	9,03
<b>60 +</b>	20,51	24,23	20,90	24,37	20,70	24,01	20,73	24,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SUPAS 2005, DIY Dalam Angka 2008, diolah

## 9. Pemuda dan Olahraga

a. Peluang

- 1) Predikat DIY sebagai pusat pendidikan.
- 2) Potensi SDM pemuda dalam pembangunan.
- 3) Semakin berkembangnya industri barang dan jasa memberi peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda.
- 4) Semakin banyak *event* olahraga dan perusahaan sponsor yang memberikan peluang untuk membudayakan olahraga dan menambah ruang publik untuk olahraga.

b. Tantangan

- 1) Menciptakan lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian serta meminimalkan dampak negatif globalisasi bagi pemuda.
- 2) Menciptakan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan.
- 2) Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga.

## 10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Peluang
  - 1) DIY sebagai kota pendidikan potensial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.
  - 2) Angka melek TI cukup tinggi.
  - 3) Semakin berkembangnya industri berbasis sains.
  - 4) Semakin berkembangnya pengelola jasa TI.
- b. Tantangan
  - 1) Membangun kemandirian pengembangan IPTEK.
  - 2) Mengefektifkan penyebaran dan komunikasi hasil pengembangan IPTEK.
- c. Isu Strategis
  - 1) Pengembangan IPTEK untuk industri berbasis sains dan TI.
  - 2) Pengembangan pembelajaran berbasis penelitian dan TI.

## 11. Penanggulangan Bencana

- a. Peluang
  - 1) Terbukanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
  - 2) Masih hidupnya nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong dalam menghadapi risiko bencana.
  - 3) Banyaknya kajian yang menjadikan DIY sebagai rujukan penanganan dan penanggulangan bencana.
- b. Tantangan
  - 1) Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi.
  - 2) Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dengan kelembagaan yang kuat.
  - 3) Melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
  - 4) Mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- c. Isu Strategis
  - 1) Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
  - 2) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan.
  - 3) Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana.
  - 4) Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat.

## D. Prasarana dan Sarana Daerah

### 1. Transportasi

- a. Peluang
  - 1) Adanya kerjasama pengelolaan transportasi dengan pihak swasta dan asing.
  - 2) Dukungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap Pengelolaan angkutan umum dengan sistem *buy the service*.

- 3) Tingginya minat maskapai penerbangan/*airlines* untuk membuka rute penerbangan langsung dari dan ke Yogyakarta melalui Bandara Adisutjipto.
- 4) Letak Provinsi DIY yang berada pada poros lintas selatan Jawa baik sisi lalu lintas angkutan jalan maupun dari sisi lalu lintas kereta api.
- 5) Letak Bandara Adisutjipto yang dapat dikembangkan menjadi bandara dengan pelayanan antar moda jalan raya, kereta api dan udara.
- 6) Keberadaan *double track* Solo-Kutoarjo sebagai bagian *double track* Surabaya-Jakarta lintas selatan, meningkatkan kemudahan akses dari dan ke Yogyakarta menggunakan kereta api.

b. Tantangan

- 1) Tingginya jumlah pemakaian kendaraan pribadi terutama sepeda motor.
- 2) Aksesibilitas wilayah dalam provinsi yang belum merata dan masih banyaknya tempat-tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi.
- 3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian ruang manfaat jalan (*rumaja*) untuk kegiatan di luar kegiatan transportasi.
- 4) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas keselamatan jalan (*rambu*, *marka*, *guardrail* dan *APILL*) yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan.
- 5) Kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan *Transport Demand Management* (TDM) sebagai salah satu solusi pengurangan kemacetan.
- 6) Untuk angkutan barang, selama ini di wilayah DIY belum mempunyai terminal barang (*bongkar-muat*) yang representatif dan tidak adanya pembatasan area serta waktu operasi angkutan yang masuk ke dalam kota walaupun ada masih lemah dalam pelaksanaannya.
- 7) *Obstacle* Bandara Adisutjipto menyebabkan perpanjangan landas pacu menjadi terbatas, selain status bandara "*enclave civil*" yang ada.

c. Isu Strategis

- 1) Penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah dan tepat waktu dengan dukungan penuh terhadap kebijakan *Transport Demand Management* (TDM).
- 2) Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya dan wisata serta sentra-sentra industri.
- 3) Pengembangan pola transportasi angkutan massal, baik MRT maupun LRT dengan menggunakan pola jaringan radial konsentrik terhadap koridor dan satelit, memanfaatkan lintas timur - barat dan utara - selatan yang telah ada.
- 4) Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan.
- 5) Pengembangan prasarana terminal terpadu di Bandara Adisutjipto dengan menitikberatkan pada kemudahan *transfer* antar moda.
- 6) Pengembangan infrastruktur angkutan barang dengan memberikan kemudahan *transfer point* angkutan umum dengan angkutan barang.

## 2. Sumberdaya Air

a. Peluang

- 1) Pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang optimalisasi kerjasama dengan Pemerintah Daerah, swasta dan asing dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk keperluan konservasi SDA, pendayagunaan air dan pengendalian kerusakan.
- 2) Pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

- 3) Tingginya curah hujan di DIY yang merupakan potensi bagi penyediaan air untuk keperluan pertanian secara luas maupun domestik di perkotaan dan perdesaan.

b. Tantangan

- 1) Perlu segera melakukan penyusunan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai dengan mendasarkan pada data-data yang ada dalam Sistem Informasi SDA.
- 2) Dalam melakukan konservasi SDA, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang berasal dari pengelola maupun dari alam. Tantangan dari pihak pengelola SDA adalah kurangnya koordinasi antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal.
- 3) Masih belum tercapainya efisiensi sarana dan prasarana irigasi yang mengakibatkan masih belum maksimalnya daerah irigasi untuk mendapat layanan irigasi.
- 4) Tindakan-tindakan merusak lingkungan menimbulkan dampak negatif khususnya berkaitan dengan penyediaan air, pencemaran air, termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.

c. Isu Strategis

- 1) Pengelolaan SDA terpadu.
- 2) Pemberdayaan petani pemakai air.
- 3) Efisiensi sarana dan prasarana irigasi.
- 4) Manajemen sumberdaya air yang profesional dan efektif.
- 5) Mengurangi bahaya banjir dan kekeringan.

### **3. Air Minum/Air Bersih**

a. Peluang

- 1) Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air minum/air bersih.
- 2) Adanya utilitas produksi dan jaringan air minum/air bersih.

b. Tantangan

- 1) Ketersediaan sumber-sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan baik distribusi, manajemen operasional maupun kualitas dan kuantitas hasil produksi.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Pengembangan penyediaan sumber-sumber air dan optimalisasi sumber-sumber air yang sudah ada.
- 3) Peningkatan pengelolaan air minum.

### **4. Air Limbah/Sanitasi**

a. Peluang

- 1) Adanya infrastruktur pengelolaan air limbah.
- 2) Kerjasama pengelolaan air limbah/sanitasi.

- b. Tantangan
  - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
  - 2) Infrastruktur pengelolaan air limbah yang belum mencakup seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan.
- c. Isu Strategis
  - 1) Pengelolaan Alir limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
  - 2) Optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi prasarana dan sarana air limbah.

## 5. Persampahan dan Drainase

- a. Peluang
  - 1) Kerjasama pengelolaan persampahan.
  - 2) Pengelolaan sampah oleh masyarakat dan swasta.
  - 3) Teknologi pengelolaan sampah.
  - 4) Adanya saluran drainase dan penerapan Sumur Resapan Air Hujan sebagai bagian dari sistem makro.
- b. Tantangan
  - 1) Penggunaan sungai dan anak sungai sebagai penerima air buangan.
  - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan jaringan drainase.
  - 3) Sarana dan prasarana yang belum optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
  - 4) Belum ada ketegasan fungsi sistem drainase.
- c. Isu Strategis
  - 1) Pengelolaan sampah/drainase terpadu.
  - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase.

## 6. Perumahan dan Permukiman

- a. Peluang
 

Kebutuhan akan perumahan yang besar, terutama di perkotaan.
- b. Tantangan
  - 1) Terdapat *backlog* yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
  - 2) Tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di daerah perkotaan.
- c. Isu Strategis
  - 1) Pembangunan rusunawa/rusunami di perkotaan.
  - 2) Penanganan daerah kumuh perkotaan.

## 7. Listrik

- a. Peluang
  - 1) Potensi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah luar negeri untuk penciptaan sumber energi listrik.
  - 2) Inovasi masyarakat dalam penemuan energi listrik terbarukan.

- b. Tantangan
  - 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara mandiri.
  - 2) Kurangnya penemuan sumber energi listrik terbarukan.
  - 3) Belum optimalnya penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi.
  - 4) Inefisiensi pemakaian listrik.
  
- c. Isu Strategis
  - 1) Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil.
  - 2) Pengembangan energi listrik baru.
  - 3) Penghematan energi listrik.
  - 4) Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan.
  - 5) Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik.

## 8. Komunikasi dan Informatika

- a. Peluang
  - 1) Terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkini.
  - 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah.
  - 3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara *on line*, yang mengacu pada konsep *consumer service priority*.
  
- b. Tantangan
  - 1) Ketersediaan data terbaru (*up to date*) masih kurang.
  - 2) Penerapan DGS di semua bidang.
  - 3) Pelayanan berbasis *on line* masih terbatas sehingga keluhan dan permasalahan masyarakat tidak dapat terselesaikan secara cepat dan tepat.
  - 4) Biaya internet yang relatif masih mahal.
  - 5) Penyediaan *one stop information service* di tempat-tempat strategis masih terbatas.
  - 6) Optimalisasi lembaga-lembaga komunikasi sosial dan lembaga media tradisional sebagai lembaga komunikasi strategis.
  
- c. Isu Strategis
  - 1) Pengembangan *Digital Government Services/E-gov*.
  - 2) Pengembangan infrastruktur jaringan.
  - 3) Pelayanan kepada masyarakat secara *on line*.
  - 4) Penyediaan internet murah dan internet masuk desa.
  - 5) Sosialisasi dan diseminasi informasi publik.
  - 6) Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu.
  - 7) Pemanfaatan media komunikasi guna peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi dan fasilitasi kegiatan penyiaran.
  - 8) Pemberdayaan informasi masyarakat memanfaatkan sumberdaya komunikasi sosial dan lembaga media tradisional serta kelompok strategis lain.
  - 9) Penyerapan aspirasi dan opini publik.
  - 10) Pemberdayaan masyarakat informasi.

## **E. Struktur dan Pola Tata Ruang**

### **1. Struktur Tata Ruang Provinsi DIY**

#### **a. Peluang**

- 1) Provinsi DIY menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 2) Berpotensi mendorong perkembangan ekonomi sekitar Provinsi DIY.
- 3) Perkembangan wilayah dalam konstelasi regional Provinsi DIY, termasuk Joglosemar, Gelangmanten, Pawonsari, Subosuko dan Barlingmascapep.
- 4) Kuatnya daya tarik Provinsi DIY dalam segala bidang dan sektor.

#### **b. Tantangan**

- 1) Sebagai PKN akan berperan sebagai pintu gerbang internasional.
- 2) Penanganan atas isu global dan tekanan internal.
- 3) Dinamisnya kondisi investasi di Provinsi DIY.
- 4) Pesatnya perkembangan kegiatan sektoral yang memerlukan pengaturan penggunaan lahan (industri, perdagangan, dan jasa).
- 5) Daya dukung lingkungan yang menurun, akibat pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan.
- 6) Penataan ruang yang belum konsisten.

#### **c. Isu Strategis**

- 1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan tata ruang.
- 2) Memantapkan struktur dan hirarki sistem kota-kota.
- 3) Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan.
- 4) Menjembatani kebijakan RTRW Provinsi yang bersifat makro dengan kebijakan RTRW Kabupaten/Kota yang bersifat parsial.
- 5) Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah.
- 6) Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya.
- 7) Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang.
- 8) Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang.
- 9) Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah.

### **2. Pola Ruang Provinsi DIY**

#### **a. Peluang**

- 1) Aksesibilitas yang baik dari segala penjuru.
- 2) Tersedianya lahan guna pengembangan wilayah.
- 3) Kondisi alam yang mendukung wisata agro.
- 4) Suasana kondusif.

- b. Tantangan
  - 1) Aturan dan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota (RTRW) sangat lemah.
  - 2) Belum tersusunnya penataan ruang secara detail pada kawasan-kawasan strategis.
  - 3) Berkurangnya lahan subur pertanian dan lahan resapan air.
  - 4) Menurunnya produksi pertanian.
  - 5) Konversi lahan yang terus berlangsung.
  
- c. Isu Strategis
  - 1) Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang.
  - 2) Menyusun peraturan daerah tentang rencana umum dan rencana detail.
  - 3) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
  - 4) Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan maupun non-hutan sebesar 30% .
  - 5) Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis.
  - 6) Mitigasi resiko bencana.
  - 7) Pengembangan Bandar Udara Internasional Terpadu.
  - 8) Pembangunan *Outer Ringroad*.
  - 9) Pengembangan Kawasan CBD (JEC).
  - 10) Pembangunan kawasan industri terpadu di Piyungan.

## F. Pemerintahan, Hukum dan Politik

### 1. Pemerintahan

- a. Peluang
  - 1) Besarnya ketertarikan para pemimpin nasional terhadap DIY.
  - 2) Besarnya perhatian dunia internasional terhadap DIY.
  - 3) Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*.
  - 4) Semakin kuatnya *civil society*.
  - 5) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
  - 6) Pemerintah Provinsi DIY secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain.
  
- b. Tantangan
  - 1) Besarnya tuntutan masyarakat.
  - 2) Dinamisnya aspirasi masyarakat.
  - 3) Belum jelasnya status keistimewaan DIY.
  - 4) Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
  - 5) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
  - 6) Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.
  - 7) Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama.
  
- c. Isu Strategis
  - 1) Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas.
  - 2) Optimalisasi kapasitas aparatur daerah.
  - 3) Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*.

## **2. Hukum**

### **a. Peluang**

- 1) Kredibilitas Pemerintah Provinsi DIY dalam penegakan hukum di mata masyarakat sangat tinggi.
- 2) Nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung adaptif terhadap tatanan hukum.
- 3) Terdapatnya lembaga swasta yang peduli hukum sehingga dapat dijadikan mitra dalam membangun hukum di Provinsi DIY.

### **b. Tantangan**

- 1) Implementasi dari peneguhan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
- 2) Kesiapan aparatur penegak hukum untuk melakukan reformasi di bidang hukum yang menjadi kewenangannya.

### **c. Isu Strategis**

Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsif hukum.

## **3. Politik**

### **a. Peluang**

- 1) Banyaknya lembaga penyalur aspirasi memudahkan masyarakat dalam menentukan lembaga penyalur aspirasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.
- 2) Banyaknya lembaga pemberdayaan masyarakat di DIY.

### **b. Tantangan**

Terwujudnya dan terpeliharanya kondisi politik yang dinamis, aman dan damai.

### **c. Isu Strategis**

- 1) Mewujudkan sinergi antar pelaku politik.
- 2) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik.
- 3) Penguatan peran partai politik.
- 4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Dasar Filosofi

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah **Hamemayu Hayuning Bawana**, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.

Hakekat budaya adalah hasil **cipta, karsa dan rasa**, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat **gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja**, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

**Hamemayu Hayuning Bawana** mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

#### B. Visi

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi pada saat ini, analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**“Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.**

**Pemerintah Daerah yang Katalistik** adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

**Masyarakat Mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

**Keunggulan Daerah** adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.

**Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika** adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalaninya, serta mempunyai sikap, sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

### C. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

### D. Tujuan

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

### E. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung*, dengan sasaran:
  - a. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan.
  - b. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif.
  - c. Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
  - d. Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.
  - e. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.
  - f. Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
  - g. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
  - h. Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
2. Misi: *Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera*, dengan sasaran:

- a. Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi.
  - b. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
  - c. Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
  - d. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.
3. Misi: *Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance*, dengan sasaran:
- a. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
  - b. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.
  - c. Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hukum.
  - d. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
4. Misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik*, dengan sasaran:
- a. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
  - b. Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik.
  - c. Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.
  - d. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah provinsi DIY dititikberatkan pada:

1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
2. Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.
3. Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

#### **A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 40% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

## 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di DIY berasal dari berbagai komponen, yaitu:

- a. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Retribusi Pelayanan Permukiman dan Prasarana Wilayah. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas, penitipan kendaraan bermotor, sewa penginapan/pesanggrahan/villa, sewa gedung Grha Wana Bhakti Yasa, sewa gedung/ruangan/aula/asrama, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan dan bidang perpustakaan daerah, retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Perizinan Tertentu berasal dari Retribusi Izin Pos dan Telekomunikasi.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pemanfaatan lahan jalan provinsi untuk pemasangan iklan
- e. Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain.

Dari berbagai penerimaan tersebut, selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, penerimaan pendapatan dari Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan terus menurun terutama pada periode 2005-2008.

Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:

### a. Perbaikan Manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini diterapkan baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD.

### b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

## 2. Optimalisasi Aset Daerah

Pemerintah Provinsi DIY memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk *Build Operating Transfer (BOT)* maupun Kontrak Konsesi.

### **3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah, dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

## **B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

### **1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

### **2. Prioritas**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi DIY, seperti sektor Pariwisata, Budaya dan Pendidikan.

### **3. Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### **4. Optimalisasi Belanja Langsung**

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

## 5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

## C. Kebijakan Umum Anggaran

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan persyaratan harus mempunyai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman yang ditunjukkan dengan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar atau sama dengan 2,5.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Provinsi DIY Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pendapatan daerah diperkirakan Tahun 2009-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 6%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen dana perimbangan. Pertumbuhan lain-lain pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh.

Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan bagi hasil Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

## 2. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk jenis belanja tidak langsung, terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk jenis belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

### a. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proyeksi pengeluaran belanja pegawai yang menjadi beban APBD DIY diperkirakan sebesar 38,4 %. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan persentase sebesar 19,7%.

Belanja pegawai banyak didukung dari Dana Alokasi Umum. Di samping kedua belanja tersebut, belanja yang signifikan cukup besar pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan.

Alokasi belanja bantuan sosial ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Selain itu, belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan akses dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

### b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi DIY, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata dan budaya serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi DIY.

## 3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.

Adapun untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan, program serta indikator berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

#### **A. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Pertama:**

***Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung***

##### **1. Strategi**

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.
- b. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
- d. Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat.
- e. Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.
- f. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
- g. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- h. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan.
- i. Pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana.
- j. Peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat.
- k. Peningkatan infrastruktur dan manajemen kesehatan.
- l. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan.
- m. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak.

##### **2. Kebijakan**

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.
- b. Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dengan daerah lain.
- c. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepastakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata.
- e. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (*Techno-Industrial Park*).
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.

- g. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
- h. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.
- i. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
- j. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
- k. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
- l. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
- m. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya.
- n. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat.
- o. Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya.
- p. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat.
- q. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
- r. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional.
- s. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdian kesejahteraan sosial.
- t. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
- u. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan.
- v. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- w. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan.
- x. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan.
- y. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika.
- z. Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi.
- aa. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
- bb. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- cc. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana.
- dd. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan.

### 3. Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Pertama sebagai berikut:

- a. Pendidikan
  - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
  - 3) Program Pendidikan Menengah.
  - 4) Program Pendidikan Tinggi.
  - 5) Program Pendidikan Luar Biasa.
  - 6) Program Pendidikan Nonformal.

- 7) Program Pendidikan Informal.
  - 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  - 10) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
  - 11) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka.
- b. Pemuda dan Olahraga
- 1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
  - 2) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
  - 3) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.
- c. Komunikasi dan Informatika
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- d. Kebudayaan
- 1) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
  - 2) Program Pengembangan Nilai Budaya.
  - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
  - 4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- e. Sosial
- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
  - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
  - 3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
  - 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  - 5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
  - 6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
  - 7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- f. Perencanaan Pembangunan
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- g. Kesehatan
- 1) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
  - 2) Program Pelayanan Kesehatan.
  - 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
  - 5) Program Kesehatan Keluarga.
  - 6) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.
  - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
  - 9) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
  - 10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.
  - 11) Program Sistem Informasi Kesehatan.
  - 12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 1) Program Keluarga Berencana.
  - 2) Program Pelayanan Kontrasepsi.
  - 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - 4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS.
  - 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

- i. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
  - 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- k. Pemberdayaan Perempuan
  - 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
  - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- l. Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
  - 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
- m. Pertanian
  - Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.
- n. Ketahanan Pangan
  - Program Pemberdayaan Penyuluhan.

#### 4. Indikator

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Angka Melek Huruf	Persen	94,90	96,98	98,93	100	100
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,7	11	11,5	12	12,5
3. Angka Partisipasi Kasar:						
a. PAUD	Persen	67	69	71	73	75
b. SD/MI	Persen	107	107	107	107	107
c. SLTP/MTs	Persen	105	105	105	105	105
d. SMU/MA/SMK	Persen	80	82	84	87	90
e. PLB	Persen	82	85,5	89	92,5	95
4. Angka Partisipasi Murni :						
a. SD/MI	Persen	95,20	95,25	95,30	95,35	95,40
b. SLTP/MTs	Persen	80-	81,5	83	84,5	86
c. SMU/MA/SMK	Persen	59	60,5	62	63,5	65
5. Angka Kelulusan:						
a. SD/MI	Persen	98,98	99,00	99,03	99,07	99,10
b. SLTP/MTs	Persen	95,01	95,20	96,50	97,20	97,60
c. SMU/MA/SMK	Persen	98,20	98,25	98,30	98,35	98,40
6. Angka Putus Sekolah:						
a. SD/MI	Persen	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
b. SLTP/MTs	Persen	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
c. SMU/MA/SMK	Persen	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional:						
a. SD/MI						
- Nasional	Peringkat	5	5	5	4	4
b. SLTP/MTs						
- Nasional	Peringkat	5	5	5	4	4
- Internasional	Even	-	1	1	1	1
c. SMU/MA/SMK						
- Nasional	Peringkat	5	5	5	4	4
- Internasional	Even	1	1	1	2	2
8. Jumlah Sekolah Standar Nasional:						
a. SD/MI	Sekolah	55	100	150	200	250
b. SMP/MTs	Sekolah	71	100	125	150	180
c. SMA/MA/SMK	Sekolah	79	92	105	121	137
9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:						
a. SD/MI	Sekolah	5	6	7	8	10
b. SMP/MTs	Sekolah	12	14	16	18	20
c. SMA/MA/SMK	Sekolah	24	32	41	53	65
10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Sekolah	1	2	3	4	5
11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional	Lembaga	20	35	45	65	80
12. Prestasi Kejuaraan PNF	Peringkat	2	1	1	1	1
13. Jumlah Mahasiswa	Orang	260.760	270.450	280.550	290.520	300.605
14. Jumlah Mahasiswa Asing	Orang	600	725	990	1.015	1.050
15. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI	Unit	10	15	20	25	30
16. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk	Unit/orang	1 : 5.000	1 : 4.500	1 : 4.000	1 : 3.500	1 : 3.000
17. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah Penduduk	Orang	1 : 2.500	1 : 2.000	1 : 1.500	1 : 1.250	1 : 1.000
18. Jumlah Anggota Jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	12	14	16	18	20
19. Ketersediaan <i>Jogja Study Centre</i> (Rumah Belajar Modern)	Unit	1	2	3	4	5
20. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan	Unit	-	-	1	1	1

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
21. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Unit	2	4	6	8	10
22. Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional:						
a. POPNAS	Peringkat	10	-	10	-	10
b. POSPENAS	Peringkat	-	5	-	3	-
c. PON	Peringkat	-	-	-	10	-
23. Jumlah Kunjungan Museum	Orang	356.723	370.000	387.000	405.000	424.000
24. Jumlah Grup/ Kelompok Kesenian	Grup	5748	6069	6390	6711	7032
25. Jumlah Benda Cagar Budaya	Buah	515	350	385	420	455
26. Jumlah Peristiwa Budaya	Event	720	790	870	960	1060
27. Jumlah Penghargaan Budaya	Organisasi	304	335	360	390	415
28. Jumlah Desa Budaya	Desa	32	41	41	41	41
29. Cakupan Penanganan PMKS	Persen	5	5	5	5	5
30. Umur Harapan Hidup	Tahun	74,1	74,2	74,3	74,4	74,6
31. Angka Kematian Balita	Per 1000 (KH)	19	18	17	16	16
32. Angka Kematian Bayi	Per 1000 (KH)	17	17	16	16	16
33. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 (KH)	104	103	102	101	100
34. Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79
35. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	Persen	12	12	12,5	12,5	13
36. Cakupan Rawat Inap RS	Persen	1,3	1,3	1,35	1,38	1,39
37. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kelompok	1	2	5	5	5
38. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR	Paket	-	5	15	30	28
39. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya	Persen	-	10	20	30	40
40. Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Persen	30	45	60	75	90
41. Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari	Persen	10	13	16	19	22

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
42. Berkembangnya Aktivitas Kelembagaan Petani	Gapoktan	20	20	20	20	20
43. Pengembangan Penyuluhan:						
a. Peningkatan Kualitas Penyuluh	Orang	300	300	300	300	300
b. Peningkatan Kemampuan Petani dan Pihak Terkait	Orang	500	500	500	500	500

**B. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Kedua:**

***Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera***

**1. Strategi**

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua sebagai berikut:

- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepariwisataan.
- b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.
- d. Pembangunan perdesaan.
- e. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- f. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- g. Revitalisasi pertanian.
- h. Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.
- i. Pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir.

**2. Kebijakan**

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua sebagai berikut:

- a. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat.
- b. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata.
- c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
- d. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- e. Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal.
- f. Meningkatkan upaya promosi terpadu *Trade, Tourism, Investment* (TTI) dan kebudayaan.
- g. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.
- h. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
- i. Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.
- j. Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.
- k. Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.
- l. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata.

- m. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi.
- n. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.
- o. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif.
- p. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
- q. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh *stakeholder* ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas.
- r. Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi.
- s. Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah.
- t. Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan.
- u. Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani.
- v. Menguatkan peranserta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- w. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- x. Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air.
- y. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- z. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan.
- aa. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat.
- bb. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan.
- cc. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan.
- dd. Meningkatkan peran sumberdaya kelautan dan pesisir.
- ee. Meningkatkan tata niaga produk perikanan.
- ff. Mempromosikan 'Gemar Makan Ikan' di masyarakat.
- gg. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- hh. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan.

### 3. Pogram

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Kedua sebagai berikut:

- a. Pariwisata
  - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
  - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - 3) Program Pengembangan Kemitraan.
- b. Koperasi dan UKM
  - 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
  - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
  - 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
  - 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- c. Perindustrian
  - 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
  - 2) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
  - 4) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
  - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.
  - 6) Program Penataan Struktur Industri.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
  - 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- e. Pemberdayaan Perempuan  
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan *Gender* dalam Pembangunan.
- f. Penanaman Modal
- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- g. Perdagangan
- 1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
  - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
  - 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
  - 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- h. Tenaga Kerja
- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
  - 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- i. Transmigrasi
- 1) Program Transmigrasi Regional.
  - 2) Program Transmigrasi Lokal.
  - 3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
- j. Pemuda dan Olahraga  
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- k. Pertanian
- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  - 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
  - 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
  - 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
  - 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
  - 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
  - 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- l. Ketahanan Pangan  
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan.
- m. Kehutanan dan Perkebunan
- 1) Program Pengembangan Agribisnis.
  - 2) Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.
  - 3) Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan
  - 4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
  - 5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
  - 7) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
  - 8) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

- n. Kelautan dan Perikanan
- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
  - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
  - 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
  - 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
  - 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
  - 6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
  - 7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam.
- o. Perencanaan Pembangunan  
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- p. Pemerintahan Umum
- 1) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah.
  - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 4. Indikator

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,2	2,4	2,6	3,0
2. Jumlah Wisatawan	Orang	1.413.133	1.554.555	1.710.910	1.881.011	2.049.211
a. Wisnus	Orang	1.271.707	1.398.877	1.538.765	1.692.642	1.861.906
b. Wisman	Orang	141.426	155.678	171.425	188.369	207.205
3. Jumlah MICE	Satuan	4.500	4.950	5.445	5.990	6.588
4. Jumlah Desa Wisata	Satuan	45	45	47	49	50
5. PAD Pariwisata DIY	Milyar Rp	67,41	74,16	81,57	89,73	98,70
6. Tingkat Hunian Hotel	Persen	50	60	65	70	75
7. Pertumbuhan PDRB	Persen	4,5 - 5,0	4,7 - 5,2	4,9 - 5,4	5,2 - 5,7	5,4 - 5,9
8. PDRB:						
a. Atas Dasar Harga Konstan	Trilyun Rp	20,07	20,99	21,95	22,95	23,99
b. Atas Dasar Harga Berlaku	Trilyun Rp	41,80	45,90	50,57	55,63	61,19
9. Indeks Ketimpangan Regional	Angka Indeks	0,322	0,318	0,314	0,310	0,306
10. PDRB per Kapita						
a. Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	5,07	6,00	6,27	6,56	6,88
b. Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	10,98	12,00	13,28	14,61	16,07
11. Pertumbuhan Investasi (PMDN/PMA)	Persen	3,96	4,15	4,34	4,53	4,72

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
12. Nilai Tukar Petani	Persen	105,78	106,28	106,78	107,28	107,78
13. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	persen	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
14. Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	2	2	2	2	2
15. Peningkatan Populasi Ternak	persen	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
16. Ketersediaan Pangan:						
a. Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
b. Ketersediaan Protein	Gr/kap/Hr	94,59	94,59	94,59	94,59	94,59
17. Distribusi dan Akses:						
-.Penguatan LDPM	Gapoktan	20	80	150	200	250
18. Peningkatan Mutu dan Keamanan:						
a. Konsumsi Energi	Kkal/kap/Hr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b. Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	52	52	52	52	52
c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)		87,1	87,6	88,1	88,6	89,1
19. Konversi Lahan	Persen	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
20. Persentase Luas Hutan	Persen	6	6	6	6	6
21. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan	Kelompok	40	50	60	70	80
22. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal	persen	1	5	7	10	12
23. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	Kelompok	20	25	30	35	40
24. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan	persen	20	25	30	35	40
25. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.669	20.743	24.239	28.338	32.035
26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5.252	5.694	6.039	6.875	7.425

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
27. Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kapita/ Tahun	18,35	18,66	19,4	20,3	20,81
28. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan	persen	2	4	6	8	10
29. Luasan Kawasan Konservasi, Restoking, Resensing	persen	-	5	10	15	20

**C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga:**

***Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance***

**1. Strategi**

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut:

- a. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
- b. Transformasi birokrasi.
- c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan.

**2. Kebijakan**

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut:

- a. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
- c. Memantapkan dan mengembangkan penerapan *E-Gov* (DGS).
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis *digital government services* pada semua sektor pemerintah daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.
- f. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. Mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
- h. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.

**3. Program**

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Ketiga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Umum
  - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 2) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
  - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
  - 5) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
  - 6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
  - 7) Program Pemantapan Reformasi Birokrasi.
  - 8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  - 9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
  - 10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - 12) Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah.
  - 13) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  - 14) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.
  - 15) Program Analisis Kebijakan Pembangunan.
  - 16) Program Penelitian dan Pengembangan.
  - 17) Program Pendidikan Kedinasan.
  - 18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - 19) Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
  - 20) Program Pengembangan Persandian.
  - 21) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- b. Pertanahan
- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
- c. Kependudukan dan Catatan Sipil  
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- d. Statistik  
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
- e. Kearsipan
- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
  - 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- f. Komunikasi dan Informatika
- 1) Program Kerjasama Informasi dengan Massmedia.
  - 2) Program Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.
- g. Perencanaan Pembangunan
- 1) Program Pengembangan Data/Informasi.
  - 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
  - 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  - 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - 4) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.
- i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- j. Pemberdayaan Perempuan  
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan *Gender* dan Anak.

#### 4. Indikator

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO	Jumlah SKPD	1	2	3	3	3

2. Penyediaan Pelayanan dari <i>Government Centris</i> menuju <i>Citizen Centris</i>	Persen	2	5	10	15	20
3. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan	Produk Hukum	12	13	14	15	16
4. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis	Orang	1:1	1:1	1:1	1:2	1:2
5. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan	persen	5	10	15	20	25
6. Penambahan Layanan Data Center DGS	Unit	5	5	5	4	4
7. Indeks Pembangunan <i>Gender</i> (IPG)	persen	70,6	70,7	78,8	70,9	71
8. Indeks Pemberdayaan <i>Gender</i> (G3EM)	persen	62,44	62,46	62,48	62,5	62,52
9. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Kelompok (Desa/ Kelurahan)	20	20	25	25	30
10. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	persen	20	25	30	30	35
11. Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	persen	10	15	20	20	25

**D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Keempat:**

***Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik***

**1. Strategi**

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut:

- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur.
- Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
- Pengurangan ketimpangan pembangunan antar-wilayah.
- Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
- Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi.

**2. Kebijakan**

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut:

- Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik.
- Menata struktur ruang sesuai RTRW.
- Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW.
- Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu.
- Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.

### 3. Pogram

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Keempat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Umum
  - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
  - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - 3) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya.
  - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
  - 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
  - 6) Program Pengendalian Banjir.
  - 7) Program Pengelolaan Persampahan.
  - 8) Program Pengembangan Kawasan.
  - 9) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
  - 10) Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
  - 11) Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
  - 12) Program Pelayanan Jasa Pengujian.
- b. Perumahan
  - 1) Program Pengembangan Perumahan.
  - 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
  - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
  - 4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.
- c. Penataan Ruang
  - 1) Program Perencanaan Tata Ruang.
  - 2) Program Pemanfaatan Ruang.
  - 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Perhubungan
  - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
  - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
  - 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
  - 4) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
  - 6) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
- e. Lingkungan Hidup
  - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
  - 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
  - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- f. Energi dan Sumberdaya Mineral
  - 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan.
  - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar.
  - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
  - 4) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi.
- g. Perencanaan Pembangunan
  - 1) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
  - 2) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- h. Kesehatan
  - 1) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

- i. Pendidikan  
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
- j. Pemuda dan Olahraga  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- k. Kebudayaan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- l. Penanaman Modal  
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- m. Kelautan dan Perikanan  
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.

#### 4. Indikator

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Persentase Penurunan <i>Backlog</i> dalam Penyediaan Perumahan	Persen	1	2	2	2	3
2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan	Persen	10	10	10	10	10
3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi	Persen	5	5	5	5	5
4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	Persen	10	10	10	10	10
5. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan	Jumlah	1	1	1	2	2
6. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	65	70	75	80	85
7. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	Persen	60	65	70	75	80
8. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan	Persen	5	6	7	8	9
9. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	40	50	60	70	75
10. Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY	Persen	10	20	30	40	50
11. Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi	Persen	55	60	65	70	75
12. Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat	Liter/detik	100	100	100	100	100
13. Persentase Penurunan Genangan	Persen	10	10	10	10	10

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
14. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah	Persen	55	60	65	70	75
15. Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem <i>Sanitary Landfill</i>	Jumlah	1	1	1	2	2
16. V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan	Rasio	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
17. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan	Persen	60	65	70	75	80
18. <i>Load factor</i> Penumpang Angkutan Umum	Persen	20	25	30	35	40
19. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun	Persen	5	5	5	5	5
20. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek	Persen	5	5	5	5	5
21. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi	Persen	10	10	10	10	10
22. Luas Wilayah Produktif	Persen	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33
23. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air:						
a. Air	BOD (mg/l)	< 10	< 10	< 9	< 9	< 8
	COD (mg/l)	< 50	< 50	< 45	< 45	< 40
b. Udara	CO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	< 15	< 15	< 14	< 14	< 13
	Pb ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	< 150	< 150	< 145	< 145	< 140
24. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani	Unit usaha	290	320	360	360	360
25. Penurunan Luas Kerusakan Lahan	Ha	3	6	6	9	9
26. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah	Cm	268	263	258	253	248
27. Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana	Buah	1	1	1	1	1
28. Jumlah Regulasi tentang Pengurangan Resiko Bencana	Buah	1	2	2	2	2
29. Rasio Elektrifikasi	Persen	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
30. Peningkatan Kapasitas Energi Listrik	Persen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air	Persen	6	6	6	6	6
32. Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis	Jumlah kelompok	5	8	10	13	15

Uraian program di atas merupakan program yang diutamakan pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasar pada indikator pencapaiannya, sedangkan program lain yang tidak tercantum dalam uraian di atas, tetap dapat dilaksanakan oleh semua urusan pengampu sesuai dengan fungsi dan ketugasannya.

**E. MATRIK: HUBUNGAN TAHAPAN DAN PRIORITAS RPJPD 2005-2025 TAHAP II DENGAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2009-2013**

**FILOSOFI** : Hamemayu Hayuning Bawana

**VISI RPJPD 2005-2025:** Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

**VISI RPJMD 2009-2013:** Pemerintah Daerah yang Katalistik dan Masyarakat Mandiri yang Berbasis Keunggulan Daerah serta Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Unggul dan Beretika

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
<p><b>1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh Sumberdaya pendidikan yang handal.</b></p>	<p>1. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing unggul, dan didukung oleh lembaga pendidikan yang bermutu tinggi.</p> <p>2. Memperluas pelayanan pendidikan dan pemberlakuan subsidi silang.</p> <p>3. Menerapkan dan meningkatkan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan pencapaian kompetensi dan pengembangan karakter lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapkan standar lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan.</li> <li>- Perluasan pelayanan pendidikan pada daerah tertinggal dan masyarakat kurang mampu.</li> <li>- Peningkatan pencapaian kompetensi dan relevansi lulusan melalui pengembangan mutu kurikulum berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.</li> <li>- Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dengan daerah lain.</li> <li>- Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.</li> <li>- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.</li> <li>- Program Pendidikan Menengah.</li> <li>- Program Pendidikan Nonformal.</li> <li>- Program Pendidikan Informal.</li> <li>- Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka.</li> <li>- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>4. Meningkatkan peran perpustakaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan.</p> <p>5. Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam pendirian pusat teknologi dan industri (<i>Techno-industrial Park</i>) sebagai katalisator industri berbasis sains (<i>science-based industries</i>) di Yogyakarta.</p> <p>6. Meningkatkan sertifikasi guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya.</p> <p>7. Meningkatkan budaya belajar dan membaca pada semua lapisan masyarakat.</p> <p>8. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan.</li> <li>- Perwujudan berdirinya pusat teknologi dan industri (<i>Techno-industrial Park</i>).</li> <li>- Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</li> <li>- Peningkatan gemar belajar dan membaca sebagai bagian dari budaya masyarakat.</li> <li>- Pembelajaran berbasis penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM keputakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata.</li> <li>- Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (<i>Techno-Industrial Park</i>).</li> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.</li> <li>- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.</li> <li>- Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.</li> <li>- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.</li> <li>- Program Pendidikan Tinggi.</li> <li>- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.</li> <li>- Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>9. Mengembangkan pendidikan multikultur dalam upaya peningkatan wawasan, keterbukaan, dan toleransi.</p> <p>10. Mendorong dalam perwujudan penataan lingkungan kawasan dan penataan ruang yang mendukung pengembangan pendidikan.</p> <p>11. Meningkatkan pencapaian kesetaraan pendidikan (laki-laki dan perempuan).</p> <p>12. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana.</p> <p>13. Meningkatkan sarana olah raga dan kesehatan yang memadai dalam menunjang proses pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pendidikan multikultur sebagai modal dasar untuk mendukung Propinsi DIY sebagai tujuan pendidikan baik dari luar daerah maupun luar negeri.</li> <li>- Sinkronisasi program-program pendidikan dan penataan ruang.</li> <li>- Pengembangan budaya kompetisi dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan.</li> <li>- Sosialisasi pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap bencana melalui berbagai media pendidikan.</li> <li>- Peningkatan sarana olah raga dan kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.</li> <li>- Menata struktur ruang sesuai RTRW.</li> <li>- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.</li> <li>- Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.</li> <li>- Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pendidikan Luar Biasa.</li> <li>- Program Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>- Program Perencanaan Sosial dan Budaya.</li> <li>- Program Perencanaan Tata Ruang.</li> <li>- Program Pemanfaatan Ruang.</li> <li>- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li> <li>- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</li> <li>- Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.</li> <li>- Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.</li> <li>- Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
<p>2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.</p>	<p>1. Mewujudkan sistem pengembangan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh sistem informasi yang efisien dan mempunyai jaringan luas.</p> <p>2. Mewujudkan pengembangan dan pelestarian dan mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.</p>	<p>a. Membangun kemitraan dan partisipasi yang sehat dan berkelanjutan antar stakeholders yang terlibat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan.</p> <p>b. Mewujudkan peranserta seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sehat dan luhur.</p> <p>a. Penyelenggaraan <i>event-event</i> kebudayaan yang dinamis, unik, berkelas dunia, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY.</p> <p>b. Penyediaan dokumen teknis implementasi, dan sosialisasi, standarisasi pengelolaan basis data dan informasi kebudayaan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.</li> <li>- Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.</li> <li>- Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya.</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.</li> <li>- Program Pengembangan Nilai Budaya.</li> <li>- Program Pendidikan Politik Masyarakat.</li> <li>- Program Pengembangan Nilai Budaya.</li> <li>- Program Pengelolaan Keragaman Budaya.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	1. Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan sektor pendukung.	<p>c. Peningkatan upaya penghargaan pemerintah terhadap aktivis-aktivis pelestari, pengembang, dan pewaris budaya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi dan mendaftarkan hak paten atas hasil karya budaya Yogyakarta.</p> <p>d. Peningkatan keberdayaan pencapaian gaya hidup yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas.</p> <p>a. Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya.</p> <p>b. Pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>c. Meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan dan pendukung pariwisata dalam pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata dengan titikberat pada:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya.</li> <li>- Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat</li> <li>- Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat.</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata.</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas</li> <li>- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.</li> <li>- Program Pengembangan Nilai Budaya.</li> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> <li>- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.</li> <li>- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.</li> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> <li>- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.</li> <li>- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.</li> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap UKM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata.</li> <li>- Pengembangan pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> <p>a. Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM.</p> <p>b. Meningkatnya promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan titik berat pada: Pengembangan pemasaran/ promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.</p>	<p>inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal.</li> <li>- Meningkatkan upaya promosi terpadu Trade, Tourism, Investment (TTI) dan kebudayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.</li> <li>- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.</li> <li>- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.</li> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.	1. Membentuk kelembagaan lokal dan unit kelompok masyarakat yang peduli akan masalah kesejahteraan sosial yang aktif dan terhubung dengan jaringan kerja.	<p>c. Meningkatnya jejaring pariwisata dengan titik berat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata.</li> <li>- Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.</li> </ul> <p>a. Pemberdayaan dan upaya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok guna meningkatkan ketahanan dan pelayanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.</p> <p>b. Penciptaan lingkungan masyarakat yang terhubung dalam jaringan sukarelawan.</p> <p>c. Peningkatan pengabdian kesejahteraan sosial.</p> <p>d. Perintisan jaminan sosial untuk masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan</li> <li>- Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan <i>up to date</i>.</li> <li>- Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya</li> <li>- Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional.</li> <li>- Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdian kesejahteraan sosial.</li> <li>- Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> <li>- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.</li> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> <li>- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</li> <li>- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).</li> <li>- Program Pembinaan Anak Terlantar.</li> <li>- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.</li> <li>- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.</li> <li>- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.</li> <li>- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.</li> <li>- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</li> <li>- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.</li> <li>- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>2. Memperbaiki dan meratakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, baik dalam hal jarak jangkauan yang lebih dekat maupun biaya yang lebih murah khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, masyarakat perdesaan terpencil (termasuk wilayah perbatasan), maupun masyarakat di lingkungan marginal kota.</p>	<p>a. Peningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh pelosok.</p> <p>b. Peningkatan profesionalisme sumberdaya kesehatan yang melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan.</li> <li>- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.</li> <li>- Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan.</li> <li>- Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan.</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan Kesehatan.</li> <li>- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.</li> <li>- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata.</li> <li>- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.</li> <li>- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata.</li> <li>- Program Sistem Informasi Kesehatan.</li> <li>- Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>- Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.</li> <li>- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.</li> <li>- Program Pengembangan Lingkungan Sehat.</li> <li>- Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi.</li> <li>- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.</li> <li>- Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.</li> <li>- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana.</li> <li>- Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan.</li> <li>- Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.</li> <li>- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>- Program Sistem Informasi Kesehatan.</li> <li>- Program Pelayanan Kesehatan.</li> <li>- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.</li> <li>- Program Kesehatan Keluarga.</li> <li>- Program Keluarga Berencana.</li> <li>- Program Pelayanan Kontrasepsi.</li> <li>- Program Kesehatan Reproduksi Remaja.</li> <li>- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS.</li> <li>- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.</li> <li>- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.</li> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> </ul>
		c. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.		
	3. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran	a. Peningkatan kegiatan usaha yang mendukung karakter wilayah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata		

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>investasi.</p> <p>4. Membentuk kemandirian dalam penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan kerjasama yang mutualistis dengan daerah-daerah penempatan yang memberikan jaminan dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan.</p>	<p>b. Peningkatan dorongan berwirausaha bagi masyarakat</p> <p>c. Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan</p> <p>d. Terpeliharanya hubungan industrial</p> <p>a. Penguatan kerjasama dan kemitraan antara daerah penempatan dengan daerah pengirim sesuai prinsip pemenuhan kebutuhan (<i>demand-supply</i>)</p> <p>b. Penguatan jaminan keberhasilan usaha dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.</li> <li>- Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas.</li> <li>- Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi.</li> <li>- Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah.</li> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li> <li>- Program Peningkatan Kesempatan Kerja.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li> <li>- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.</li> <li>- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.</li> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.</li> <li>- Program Transmigrasi Regional.</li> <li>- Program Transmigrasi Lokal.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>5. Mewadahi aspirasi perempuan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan peran perempuan dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.</p> <p>6. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.</p>	<p>a. Pengembangan aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi</p> <p>b. Peningkatan kemampuan perempuan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan dirinya</p> <p>c. Peningkatan dukungan terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.</p> <p>a. Penguatan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.</p> <p>b. Pengembangan budaya daerah dan menjadikan lokasi-lokasi industri sebagai kunjungan dan atraksi wisata.</p> <p>c. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan ekonomi sesuai dengan peruntukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan.</li> <li>- Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan.</li> <li>- Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.</li> <li>- Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</li> <li>- Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.</li> <li>- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.</li> <li>- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.</li> <li>- Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.</li> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</li> <li>- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> <li>- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.</li> <li>- Program Pengembangan Kemitraan.</li> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</li> <li>- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.</li> <li>- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.</li> <li>- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
		<p>dan prioritasnya.</p> <p>d. Pemantapan sistem jaringan transportasi yang sinergi inter dan antar moda</p> <p>e. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam</p>	<p>infrastruktur ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu.</li> <li>- Meningkatkan pendayagunaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.</li> <li>- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.</li> <li>- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</li> <li>- Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.</li> <li>- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan.</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.</li> <li>- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.</li> <li>- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Program Pengelolaan Persampahan.</li> <li>- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.</li> <li>- Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.</li> <li>- Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi.</li> <li>- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya.</li> <li>- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.</li> <li>- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.</li> <li>- Program Pengendalian Banjir.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>7. Meningkatkan komoditas produk industri di lingkup usaha, mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kreatif yang khas dan orisinal, didukung lokasi-lokasi kegiatan industri yang berperan sebagai daya tarik kunjungan dan atraksi wisata daerah.</p>	<p>a. Pemasyarakatan peraturan dan penerapan tata ruang wilayah yang tanggap dini terhadap perkembangan dan dinamika sosial ekonomi di masa depan</p> <p>b. Peningkatan peluang investasi disertai jaminan fasilitas dan kemudahan prosedur.</p> <p>c. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif untuk mendorong perekonomian rakyat</p> <p>d. Mempertahankan dan mengembangkan kerjasama kemitraan, baik dalam maupun luar negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW.</li> <li>- Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.</li> <li>- Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif.</li> <li>- Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Persampahan.</li> <li>- Program Pengembangan Kawasan.</li> <li>- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.</li> <li>- Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.</li> <li>- Program Pengaturan Jasa Konstruksi.</li> <li>- Program Pelayanan Jasa Pengujian.</li> <li>- Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.</li> <li>- Program Perencanaan Tata Ruang.</li> <li>- Program Pemanfaatan Ruang.</li> <li>- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan.</li> <li>- Program Pengembangan Perumahan.</li> <li>- Program Lingkungan Sehat Perumahan.</li> <li>- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.</li> <li>- Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.</li> <li>- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.</li> <li>- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.</li> <li>- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.</li> <li>- Program Penataan Struktur Industri.</li> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</li> <li>- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.</li> <li>- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.</li> <li>- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>8. Membentuk sistem budidaya pertanian yang menjamin kebutuhan pangan penduduk serta berkembangnya jenis-jenis komoditas pertanian yang lebih teragamkan (diversifikasi), bernilai ekonomi lebih tinggi (komersial) serta kompetitif dari segi kualitas produknya termasuk produk pertanian lahan kota.</p>	<p>a. Pemanfaatan benih unggul guna meningkatkan pendapatan petani.</p> <p>b. Mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya meningkatkan produktifitas pertanian.</p> <p>c. Penganekaragaman jenis komoditas pertanian yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.</p> <p>d. Peningkatan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani.</li> <li>- Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi Sumberdaya air.</li> <li>- Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.</li> <li>- Menguatkan peranserta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>	<p>Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah.</li> <li>- Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.</li> <li>- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.</li> <li>- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.</li> <li>- Program Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>- Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan.</li> <li>- Program Peningkatan Ketahanan Pangan.</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Pemberdayaan Penyuluhan.</li> <li>- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.</li> <li>- Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	9. Meningkatkan konsumsi dan permintaan produk ikan dari dunia usaha dan masyarakat	<p>a. Peningkatan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan</p> <p>b. Peningkatan pemasaran dan tata niaga produk ikan</p> <p>c. Penyebarluasan/ kampanye/ sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat.</p> <p>d. Pengembangan budidaya ikan air tawar, air laut, dan peningkatan kemampuan petani perikanan tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.</li> <li>- Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan.</li> <li>- Meningkatkan peran sumberdaya kelautan dan pesisir.</li> <li>- Meningkatkan tata niaga produk perikanan.</li> <li>- Mempromosikan Gemar Makan Ikan di masyarakat.</li> <li>- Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.</li> <li>- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.</li> <li>- Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan.</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.</li> <li>- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.</li> <li>- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</li> <li>- Program Pengembangan Budidaya Perikanan.</li> <li>- Program Pengembangan Perikanan Tangkap.</li> <li>- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.</li> <li>- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.</li> <li>- Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam.</li> <li>- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.</li> <li>- Program Pengembangan Perikanan Tangkap.</li> <li>- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>10. Menjaga dan melestarikan pertumbuhan tanaman ikutan hutan untuk kebutuhan dunia usaha dan rumahtangga serta terbentuknya kelompok-kelompok pelestari hutan.</p>	<p>a. Peningkatan produksi hasil hutan</p> <p>b. Pengoptimisasikan pertumbuhan tegakan kawasan hutan melalui peran masyarakat secara terstruktur</p> <p>c. Pemberian sosialisasi pelestarian hutan di lingkungan pendidikan dasar menengah</p> <p>d. Pengelolaan dan pengembangan hutan taman kota</p> <p>e. Pemanfaatan produksi perkebunan yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan.</li> <li>- Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat.</li> <li>- Memasyarakatkan pelestarian hutan kepada anak sekolah sejak dini.</li> <li>- Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.</li> <li>- Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Agribisnis.</li> <li>- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.</li> <li>- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.</li> <li>- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.</li> <li>- Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.</li> <li>- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</li> <li>- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.</li> <li>- Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan.</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.</li> <li>- Program Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
	<p>11. Merumuskan peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dalam pembagian urusan untuk mengurangi tumpang-tindih dan konflik kepentingan sebagai tindak lanjut otonomi pemerintahan daerah</p>	<p>a. Pengembangan komunikasi, integrasi sinkronisasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah</p> <p>b. Pengurangan tumpang-tindih kewenangan dan yurisdiksi serta konflik kepentingan antar daerah, antara daerah dan pusat, antar bidang, dan antar lembaga melalui peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dan pembagian urusan.</p> <p>c. Memantapkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan titik berat pada penguasaan teknologi informasi oleh seluruh jajaran pegawai pemerintahan sebagai basis utama pelayanan publik.</p> <p>d. Peningkatan dan pengembangan jejaring kemitraan antar <i>stakeholder</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.</li>   <li>- Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.</li>   <li>- Memantapkan dan mengembangkan penerapan <i>E-Gov</i> (DGS).</li>   <li>- Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.</li> <li>- Program Penataan Administrasi Kependudukan.</li> <li>- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.</li> <li>- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.</li>   <li>- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>- Program Pemantapan Reformasi Birokrasi.</li> <li>- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.</li> <li>- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.</li> <li>- Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah.</li> <li>- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.</li>   <li>- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.</li> <li>- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.</li>   <li>- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.</li> <li>- Program Analisis Kebijakan Pembangunan.</li> <li>- Program Penelitian dan Pengembangan.</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
		<p>e. Peningkatan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, dan sumberdaya aparatur, dengan titik berat pada peningkatan kualitas SDM Pemerintahan (PNS) untuk mencapai profesionalisme kinerja pegawai guna mendukung layanan publik yang prima.</p>	<p>tinggi dan partisipasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.</li> <li>- Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.</li> <li>- Program Kerjasama Informasi dan Massmedia.</li> <li>- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.</li> <li>- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.</li> <li>- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.</li> <li>- Program Analisis Kebijakan Pembangunan.</li> <li>- Program Penelitian dan Pengembangan.</li> <li>- Program Pendidikan Kedinasan.</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</li> <li>- Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.</li> <li>- Program Pengembangan Persandian.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.</li> <li>- Program Pengembangan Data/Informasi.</li> <li>- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>- Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.</li> <li>- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media</li> </ul>

MISI RPJPD	TAHAP II RPJPD	PRIORITAS TAHAP II	KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2009-2013	PROGRAM RPJMD TAHUN 2009-2013
1	4	5	6	7
		<p>f. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum</p> <p>g. Peningkatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</li> <li>- Mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.</li> </ul>	<p>Massa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.</li> <li>- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.</li> <li>- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</li> <li>- Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.</li> <li>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</li> <li>- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.</li> </ul>

## BAB VII

### P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 tahun terakhir di tahap pertama dan 4 tahun di tahap kedua.

RPJMD Tahun 2009-2013 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DIY.

Mengingat RPJMD Tahun 2009-2013 akan berakhir pada tahun 2013, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan tahun 2014, RPJMD Tahun 2009-2013 tetap digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Program APBD Tahun 2014.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Gubernur DIY dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DIY;
3. Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2009-2013 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2009-2013;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2009-2013 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Provinsi DIY;
6. Penyusunan RKPD Provinsi DIY dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten/Kota;
7. RKPD Provinsi DIY harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi DIY merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10. Agar RPJMD Tahun 2009-2013 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

- b. Kepala Bappeda Provinsi DIY menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda Provinsi DIY menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Provinsi DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi DIY untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TTD**

**HAMENGKU BUWONO X**